

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.894, 2015

KEMENKOMINFO. Rencana Strategis. Tahun
2015-2019.

**PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015-2019
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005--2025, dipandang perlu dilakukan Penyusunan Rencana Strategis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

- Tahun 2005--2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015--2019;
 9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015--2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 selanjutnya disebut Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019, adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang merupakan dasar dan acuan pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika selama 5 (lima) tahun ke depan mulai dari tahun 2015.

Pasal 2

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 selengkapnya terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015--2019;
- b. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, dan pengendalian pelaksanaan anggaran tahunan;
- c. penyusunan Laporan Kinerja; dan
- d. pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan sasaran strategis maka Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2015
MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN 2015—2019

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Kondisi Umum

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai *leading sektor* di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015—2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

**Capaian Program Kementerian Komunikasi dan Informatika
Tahun 2010—2014**

Selama periode tahun 2010—2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencapai target-target pembangunan di bidang komunikasi dan Informatika antara lain melalui penetapan kebijakan dan regulasi; pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas; mendorong pemanfaatan yang produktif, sehat dan aman; diseminasi informasi publik; serta penelitian dan pengembangan SDM di bidang komunikasi dan informatika.

Kebijakan dan Regulasi



Kebijakan dan regulasi merupakan capaian strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai payung hukum pelaksanaan pos, komunikasi dan informatika. Dalam kurun waktu tahun 2010—2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan kebijakan dan regulasi sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
3. Kebijakan penataan pita frekuensi 2.1 GHz;
4. Kebijakan netral teknologi BWA 2.3 GHz;
5. Kebijakan penetapan besaran dan penggunaan BHP Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPFSR atau BHP Pita);
6. Kebijakan tentang acuan teknis standar perangkat pos dan informatika serta pelayanan sertifikasi perangkat pos dan informatika untuk semua perangkat yang beredar di wilayah Republik Indonesia.

Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas



Dalam kurun waktu tahun 2010—2014 capaian terkait pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas adalah:

Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) / Universal Service Obligation (USO)

Program ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi kesenjangan digital (*digital divide*)

Public Service Obligation (PSO) bidang pos untuk 2322 KPC LPU

khususnya di daerah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan dan daerah yang secara ekonomi belum berkembang;

Merupakan penyediaan jasa pos sesuai yang dilakukan untuk kantor pos cabang layanan pos universal (KPC LPU). KPC LPU yang melaksanakan PSO bidang pos selama periode 2010—2014 rata-rata per tahun sebanyak 2.322 KPC LPU;

Penomoran kode pos di 11 wilayah perbatasan dan pulau terdepan

Dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pemberian kode pos melalui pembangunan tugu berkode pos. Sampai dengan tahun 2014 sudah dibangun tugu berkode pos di 11 wilayah perbatasan dan pulau terdepan Indonesia.

NIX di 19 ibukota provinsi dan IIX di 3 ibukota provinsi

Program ini merupakan bentuk perwujudan tersedianya akses internet yang cepat, berkualitas, sehat, aman dan murah untuk akses lokal maupun internasional. Tujuan Nusantara Internet Exchange (NIX) dan International Internet Exchange (IIX) adalah agar para penyelenggara telekomunikasi dapat meningkatkan kualitas layanannya karena berkurangnya *latency*, meningkatkan kecepatan dan *quality of service (QoS)* dan berdamask pada pengurangan biaya operasional ISP/NAP. NIX dan IIX juga merupakan sarana filter konten, pengamanan jaringan, serta menjadi pendorong pertumbuhan konten melalui penyediaan sarana dan infrastruktur *web cache* dan *colocation* untuk penyelenggara telekomunikasi serta penyelenggara sistem transaksi elektronik. Sampai dengan tahun 2014, NIX telah dibangun di 33 ibukota provinsi (19 yang beroperasi), sedangkan IIX telah dibangun di 4 ibukota provinsi (3 yang beroperasi);

Palapa Ring di 362 Kab/ Kota

Jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring yang merupakan infrastruktur akses tetap pitalebar telah dibangun oleh PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) di 362 kabupaten/kota;

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi



Capaian terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kurun waktu tahun 2010—2014 adalah:

Government Service Bus di 37 instansi Pemerintah

Sampai dengan tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyediakan layanan *Government Service Bus*-(GSB-MANTRA) untuk 37 instansi pemerintah;

Pilot project e-learning untuk 300 SD dan 200 SMP DIY

Sebagai upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun *pilot project* e-learning untuk 300 SD dan 200 SMP di provinsi DI Yogyakarta;

Perlindungan masyarakat melalui PP No. 82 Tahun 2012

Perlindungan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik dilakukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana yang menjadi domain kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika terbatas dari sisi teknologi informasi yang diatur pada pasal 3 PP 82/2012 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik;

Indeks PeGI Nasional telah mencapai 2,8

Kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah telah dipetakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) dengan tujuan agar dapat menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Hasil pemetaan kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah secara nasional digambarkan dalam bentuk indeks PeGI Nasional, dimana pada tahun 2014 indeks PeGI Nasional menggambarkan kondisi pemanfaatan TIK di instansi pemerintah sudah baik dengan nilai indeks 2,8;

Aplikasi e-Bussiness untuk 300 UKM

Untuk meningkatkan peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perdagangan sebagai tulang punggung perekonomian bangsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah

memfasilitasi bantuan penyediaan infrastruktur maupun pembangunan *softskill*, dengan meningkatkan penggunaan aplikasi *e-bussiness* untuk UKM melalui pemanfaatan web log dan blog sebagai sebuah alternatif marketing channel dalam mempromosikan produk atau usaha yang dimiliki oleh para pelaku UKM. Sampai dengan tahun 2014, jumlah UKM yang telah menerapkan aplikasi *e-bussiness* sebanyak 300 UKM di seluruh Indonesia;

Trust+Positif telah memblokir 811.050 situs berkonten negatif

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pengembangan sistem Trust+Positif untuk menyaring konten internet yang dapat digunakan masyarakat menuju internet sehat dan aman, yang dalam tahap ini menjadi acuan bagi pelayanan *internet service provider* (ISP). Sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan pemblokiran terhadap 811.050 situs dengan konten negatif;

Pemberdayaan 6.000 Relawan TIK

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberdayakan relawan TIK sebanyak 6.000 orang yang berasal dari seluruh elemen masyarakat yang ingin melakukan transformasi pemahaman TIK yang sehat untuk menuntaskan kesenjangan digital;

Pemeringkatan keamanan informasi di 84 instansi pemerintah

Pemeringkatan keamanan informasi merupakan tindak lanjut dari penerapan indeks keamanan informasi. Pemeringkatan itu merupakan tahap awal kajian penerapan tata kelola keamanan informasi di Kementerian/Lembaga. Sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan pemeringkatan keamanan informasi di 84 instansi pemerintah;

Pembentukan kelompok kerja Id-SIRTII/CC

Pembentukan kelompok kerja Id-SIRTII/CC (*Indonesia Security Incident Response Team of Internet Infrastructure/Coordination Center*) untuk pencegahan, pemantauan, pendeteksian, dan peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan jaringan telekomunikasi serta penanganan insiden pada infrastruktur kritis. Pada tahun 2014 total data serangan yang tercatat oleh sistem pemantauan mencapai 18,4 juta serangan, dengan insiden

website yang tercatat sebanyak 12.088 insiden dan target terbanyak adalah domain.go.id sejumlah 3.288 insiden.

Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik



Advokasi pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil mendorong pembentukan

Pembangunan Media Center

PPID di 34 kementerian, 129 lembaga negara, 34 provinsi, 399 kabupaten, dan 98 kota;

Dalam rangka mendukung fungsi dan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *Government Public Relation/Humas* Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun pusat media (*media center*) di 171 lokasi.

200 KIM telah terbentuk di seluruh Indonesia

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi ke daerah perbatasan, daerah terdepan, daerah rawan konflik atau pascakonflik, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada daerah perbatasan, daerah terdepan, daerah rawan konflik atau pasca konflik dengan jumlah 200 KIM di seluruh Indonesia.

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika



Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika, beberapa program unggulan yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang komunikasi dan informatika sejumlah

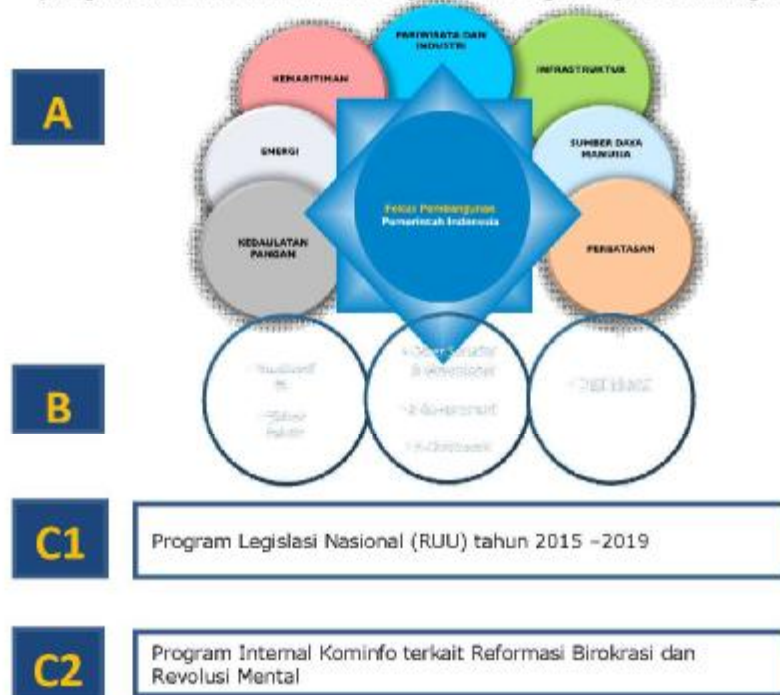
11 SKKNI, program beasiswa S2 dan S3 dalam dan luar negeri sejumlah 2.566 orang penerima beasiswa, serta pelaksanaan program pendidikan penyiaran dan multimedia dilaksanakan di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Sedangkan terkait penelitian, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menghasilkan 204 karya riset dan penelitian yang telah diterbitkan dalam berbagai terbitan ilmiah.



1.2 Potensi dan Permasalahan

Program Utama Kemenkominfo

Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara



A. Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia



Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2015—2019, antara lain sebagai berikut:



1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia

Pemahaman tentang digital divide atau kesenjangan digital selalu dikaitkan dengan perbedaan antara akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang disebabkan karena kerimpangan dan perbedaan akibat ketidakseimbangan pertumbuhan TIK. Permasalahan kesenjangan digital di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tidak terucutnya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung di berbagai daerah. Kendala serius yang dihadapi pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital terletak pada cara pandang masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pemerintah perlu meyakinkan dan melatih masyarakat bahwa penggunaan TIK mampu meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan ketersediaan informasi yang cepat serta mudah digunakan di berbagai aspek bidang kehidupan.

2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi

Luas wilayah dan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta

penggunaan satelit yang kurang optimal menyebabkan jangkauan penyebaran informasi menjadi tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha menyisakan *blank spot* di wilayah non-komersial. Kondisi ini perlu segera diatasi untuk memenuhi amanah Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring)

Palapa ring merupakan rencana pembangunan jaringan serat optik yang nantinya akan menjadi tulang punggung bagi telekomunikasi nasional, dengan tujuan menjangkau seluruh wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke. Pembangunan Palapa Ring dibagi menjadi dua bagian, laut dan darat yang masing-masing memiliki panjang kabel (jaringan serat optik) 35.280 Km dan 21.807 Km yang meliputi 497 kabupaten/kota. Sampai saat ini masih terdapat 135 kabupaten/kota yang belum terjangkau jaringan infrastruktur serat optik nasional (Palapa Ring).

4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat Vs Turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan



Edelman Trust Barometer pada awal 2015 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan meningkat 16% (dari 49% di 2014, menjadi 65% di 2015). Kepercayaan publik harus diperhatikan dengan baik. Jika masyarakat tidak melihat perubahan yang berarti maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun dengan cepat.

Survei LSI Januari 2015 menunjukkan penurunan kinerja pemerintah dengan tiga rapor merah (hukum, ekonomi, politik) dan dua rapor biru (sosial, keamanan). Dibandingkan data survei Agustus 2014, harapan atas kinerja pemerintah pada Januari 2015 melesot (dari 71,73% menjadi 42,29%).

Dua data survei di atas menunjukkan bahwa pemerintah memerlukan instansi yang berperan sebagai *Public Relation* (PR), untuk menjembatani hubungan pemerintah dengan masyarakat dan antar instansi pemerintah. Selain itu PR juga berfungsi sebagai penyedia informasi yang akurat sehingga dapat menjaga citra pemerintah di mata masyarakat, dan masyarakat dapat

melihat kinerja positif pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan.

5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa



Visi Presiden tentang Revolusi Mental telah menjadi program nasional, namun banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang apa dan bagaimana Revolusi Mental dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut terjadi karena minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Minimnya penyebarluasan konten informasi tentang Revolusi Mental yang dilakukan pemerintah telah menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk mendukung suksesnya program nasional Revolusi Mental. Terjadinya pergeseran karakter bangsa kearah negatif dan maraknya serbuan budaya asing tanpa disadari mulai menggerus budaya asli bangsa Indonesia.

Perlu ada gerakan perubahan untuk mengatasi hal ini. Oleh karena itu diperlukan revolusi mental untuk memperbaiki pola pikir masyarakat saat ini. Revolusi Mental merupakan upaya revitalisasi terhadap karakter dasar dari manusia Indonesia yang ramah, toleran, kekeluargaan, dan golong royong.

Sedangkan tantangan dan potensi program USO yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi



Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan, pada tahun 2015—2019 terdapat 187 lokasi prioritas di 39 kab/kota wilayah perbatasan yang akan dilakukan percepatan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Permasalahan yang perlu segera di atasi antara lain yaitu masih rendahnya akses masyarakat perbatasan terhadap informasi (media audio visual dan cetak); masih rendahnya akses masyarakat perbatasan terhadap jaringan

telekomunikasi karena kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi; masih sulit dan mahalnya biaya komunikasi karena minimnya jumlah BTS yang dibangun (untuk infrastruktur jalan, dan energi listrik); dan sinyal telekomunikasi dari negara tetangga lebih kuat dari sinyal telekomunikasi NKRI. Hal-hal tersebut telah menyebabkan rentannya nasionalisme; kurangnya akses informasi masyarakat perbatasan tentang Indonesia sehingga mudah terpengaruh dan dapat menimbulkan gangguan terhadap keutuhan NKRI; dan tidak berkembangnya ekonomi daerah sehingga mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

2. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU

10.473

SMK dan SMU di seluruh Indonesia



- Memerlukan ketersediaan akses internet
- Pemberdayaan TIK melalui e-literasi
- Peningkatan keahlian dan kompetensi SDM Bidang komunikasi dan Informatika

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan menyebutkan 10.473 SMK dan SMU memerlukan ketersediaan akses internet dan pemberdayaan TIK melalui e-literasi. Sedangkan terkait peningkatan keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan ToT Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan target 2015—2019 sebanyak 13.175 peserta.

3. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian

5.232

BP3K



- Memerlukan ketersediaan akses internet

Sesuai dengan data yang di keluarkan oleh Kementerian Pertanian, terdapat 5.232 Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) membutuhkan penyediaan, penguatan, dan peningkatan akses internet untuk penyebaran informasi publik bidang pertanian. Tersedianya akses internet dalam kaitannya dengan desa pertanian dapat memudahkan petani untuk mencari informasi mengenai bibit unggul, harga pupuk, ataupun teknik bercocok tanam yang baik serta segala informasi yang menyangkut bidang pertanian sehingga dapat mengurangi potensi kerugian yang akan terjadi. Selain itu, petani juga dapat mengecek harga pasaran produk pertanian mereka

tanpa harus pergi ke kota. Dengan adanya internet, petani dapat mempromosikan hasil pertanian kepada calon pelanggan di luar kota lebih cepat sehingga tingkat ekonomi petani juga dapat meningkat.

4. Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan

230.000

Nelayan dengan muatan perahu <30 GT



Belum dilengkapi dengan radio keselamatan ketika berada di tengah laut

Sesuai dengan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 230 ribu nelayan dengan muatan perahu kecil (<30 GT) yang belum dilengkapi radio keselamatan ketika berada di tengah laut.

**B. Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
Sebagai *Leading Sector***



Potensi dan permasalahan yang penyelesaiannya merupakan prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang komunikasi dan informatika adalah:

1. Masih Tingginya Harga Layanan Pitalebar

Kurangnya infrastruktur pitalebar dan belum optimalnya infrastruktur yang ada menyebabkan tingginya harga layanan pitalebar (*demand* lebih tinggi dari pada *supply*).

2. Potensi Kontribusi Pitalebar Terhadap Ekonomi



Pitalebar yang berkembang pesat dan berinteraksi dengan ekonomi saat ini memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi dan ruang lingkup pitalebar sebagai *enabler* bagi perubahan struktural ekonomi menjadi semakin besar efeknya terhadap

¹ Perpres 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia
Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015–2019

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena mempengaruhi peningkatan jumlah sektor dan aktivitas ekonomi. Efek langsung pitalebar berasal dari dampak pada pendorong faktor pertumbuhan seperti inovasi, munculnya barang dan jasa baru, proses baru, model bisnis baru, dan meningkatnya daya saing dan fleksibilitas dalam ekonomi. Dengan adanya penetrasi fixed pitalebar sebanyak 1% menghasilkan penurunan pengangguran sejumlah 8,6%². Meningkatnya penetrasipitalebar sebanyak 10% juga berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38%³.

3. Spektrum Frekuensi Radio sebagai Sumber Daya Alam yang Terbatas



Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas. Diperkirakan pada tahun 2019 Indonesia akan membutuhkan 350 MHz spektrum frekuensi radio untuk penerapan pitalebar⁴.

4. Potensi Pertumbuhan Layanan 4G LTE terhadap Peningkatan GDP, APBN dan Lapangan Kerja



Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menata spektrum frekuensi untuk keperluan layanan 4G *Long Term Evolution (LTE)*, penerapan teknologi 4G *LTE* diharapkan akan menghemat biaya infrastruktur secara signifikan. 4G *LTE* adalah teknologi yang diklaim sebagai jaringan nirkabel paling cepat pertumbuhannya dan didaulat untuk menggantikan *High Speed Downlink Packet Access (HSDPA)*. Nantinya 4G *LTE* diharapkan beroperasi di frekuensi 700 Mhz yang memiliki jangkauan lebih luas dari frekuensi yang lain (2100, 2300, dsb).



Adanya akses yang lebih cepat berdampak pada peningkatan *Gross Domestic Product (GDP)* masyarakat,

² Katz, et. Al (2009)

³ World Bank

⁴ Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika

peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta meningkatkan lapangan kerja.

5. Potensi Kehilangan Hak Penggunaan Slot Orbit



- Ruang angkasa termasuk orbit satelit geostasioner (GSO) tidak dapat dijadikan kepemilikan oleh negara
- Indonesia dapat kehilangan hak menggunakan orbit satelit (Filling Satelit) yang didaftarkan ke ITU jika tidak menggunakan dan tidak ada fisik

Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menjadikan fungsi satelit sangat vital dan strategis dalam membangun konektivitas nasional, karena satelit dapat menjangkau wilayah Indonesia yang belum terdapat infrastruktur telekomunikasi. Pemanfaatan satelit diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan aktivitas sektor telekomunikasi, ekonomi, dan pertahanan.

6. Belum Terjangkaunya Seluruh Wilayah Indonesia dengan Jaringan Infrastruktur Pitalobar (Palapa Ring)

135

Kab/Kota



Belum terjangkau jaringan infrastruktur pitalobar

Palapa Ring merupakan proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi inisiatif pemerintah dan swasta berupa pembangunan serat optik di seluruh wilayah Indonesia yang menjangkau 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota. Proyek ini terdiri atas tujuh lingkaran kecil serat optik untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku. Melalui Palapa Ring diharapkan seluruh Indonesia terhubung dengan layanan pitalobar. Namun saat ini, 135 kabupaten/kota belum terjangkau jaringan infrastruktur pitalobar⁵.

7. Belum Optimalnya Pemanfaatan NIX

19

NIX



Belum dimanfaatkan secara optimal

NIX adalah tempat secara fisik bertemunya koneksi antar penyelenggara internet maupun penyedia konten untuk saling bertukar data. Tujuan pembangunan NIX adalah agar para

⁵ RPJMN 2015-2019

penyelenggara telekomunikasi dan pengguna layanan internet dapat mengakses internet menjadi lebih cepat, berkualitas, dan tarif layanan yang terjangkau (mengurangi biaya trafik nasional dan internasional sampai ke wilayah pelayanan universal telekomunikasi), sehingga industri konten nasional dapat tumbuh dan pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada periode 2010—2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun NIX di 33 provinsi, namun baru 19 NIX yang beroperasi.

8. Tingginya Tingkat Persaingan Antar Penyelenggara Telekomunikasi dan Rendahnya Kualitas Layanan

Saat ini industri telekomunikasi di Indonesia sudah jenuh dengan tingkat persaingan yang tinggi, terlebih terjadi persaingan harga antar operator dalam menentukan tarif layanan telekomunikasi. Namun, persaingan harga tersebut tidak diikuti dengan kualitas layanan yang baik, dimana harga layanan pitalebar masih di atas 5% dari UMR.

9. Belum Efisiennya Infrastruktur Telekomunikasi Nasional

Infrastruktur
Telekomunikasi



Pendapatan sektor
telekomunikasi tidak
terdistribusi ke daerah-
daerah

Belum Efisien

Tingginya biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan belum efisiennya infrastruktur telekomunikasi nasional menyebabkan penetrasi pitalebar berjalan lambat karena para penyelenggara telekomunikasi hanya fokus membangun di daerah yang layak secara komersial, sehingga pendapatan sektor telekomunikasi tidak terdistribusi merata ke daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia.

10. Belum Efisiennya Proses Perizinan Spektrum Frekuensi Radio

Pemohonan penggunaan spektrum frekuensi radio (izin Stasiun Radio/ISR) yang dilakukan manual ditemukan banyak kendala antara lain, permohonan ISR melalui jasa perposan sering kali banyak diterima setelah Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Slot Orbit Satelit (Unit Pelayanan Teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika) melakukan penertiban, data permohonan ISR melalui jasa perposan sering tidak lengkap atau

tidak jelas, terlambatnya penerbitan ISR, pendistribusian ISR melalui jasa pos ke UPT perlu waktu lama, kesalahan dalam pengitinan ISR. Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah proses perizinan yang panjang berdampak kepada lama waktu proses permohonan ISR yang membutuhkan waktu maksimal 14 hari.

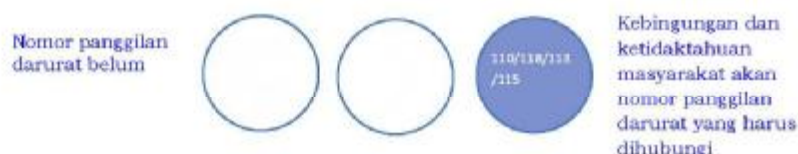
11. Masih Rendahnya TKDN di Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Beredar di Indonesia



Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerapkan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) alat dan perangkat telekomunikasi sebesar 20% untuk *Subscriber Station* (SS) dan 30% pada *Base Station* (BS). Masih kecilnya TKDN yang dipersyaratkan menyebabkan masih bergantungnya Indonesia terhadap impor alat dan perangkat telekomunikasi karena hanya sebagian kecil alat dan perangkat telekomunikasi yang sudah diproduksi di dalam negeri. Pada tahun 2014, impor alat dan perangkat telekomunikasi mencapai Rp 67 triliun⁴ hal ini menjadi salah satu pemicu defisit Neraca Perdagangan Indonesia dan hilangnya potensi penciptaan lapangan kerja dikarenakan produksi alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan di luar negeri. Dampak positif kebijakan TKDN adalah kemandirian pengembangan teknologi telekomunikasi; peningkatan produk dalam negeri; pemicu peluang usaha industri kreatif; keberpihakan negara kepada industri telekomunikasi dalam negeri.

⁴ BPS (2014)

12. Belum Terintegrasinya Nomor Panggilan Darurat



Tidak terintegrasikan dan kurangnya sosialisasi nomor panggilan darurat di Indonesia telah menyebabkan kebingungan dan ketidaktahuan masyarakat akan nomor panggilan darurat mana yang harus dihubungi ketika terjadi kondisi darurat. Saat ini terdapat beberapa nomor panggilan darurat yang di layani oleh instansi yang berbeda seperti 110 untuk bantuan kepolisian, 118 untuk ambulans, 113 untuk pemadam kebakaran, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan penataan dan integrasi nomor panggilan darurat menjadi nomor panggilan tunggal darurat yang dapat menjawab semua panggilan darurat yang sering dibutuhkan oleh masyarakat.

13. Maraknya *Spam*, *Fraud*, dan Kasus Penyalahgunaan *Refilling Traffik Terminasi Internasional*



Banyaknya simcard pebayar yang beredar saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah berganti nomor. Kemudahan untuk mendapatkan nomor dengan harga murah dewasa ini dimanfaatkan pengguna layanan dan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk menyebarkan informasi. Bukan hanya menyebarkan informasi, penyelenggara jaringan telekomunikasi juga membunji *inbox* dengan mengirimkan pesan yang berisi promo tentang produk atau program yang sedang diadakan (*spam*). Pengguna layanan yang tidak bertanggung jawab pun kerap melakukan penipuan melalui sms tanpa terdeteksi identitasnya. Selain itu, penggunaan Sim Box untuk merekayasa sambungan internasional yang seharusnya menggunakan tarif internasional juga menjadi tarif lokal. Kasus penyalahgunaan Refilling Traffik Terminasi Internasional (RTTI) ini, menyebabkan kerugian pihak penyelenggara layanan telekomunikasi hingga mencapai Rp 1,2 triliun per tahun⁷.

14. Maraknya Perangkat Telekomunikasi Seluler Ilegal



Demand terhadap perangkat telekomunikasi seluler yang tinggi di Indonesia telah menyebabkan maraknya perangkat ilegal di Indonesia, karena konsumen menginginkan perangkat terbaru dengan harga murah. Setiap tahun beredar lebih dari 10 juta unit perangkat telekomunikasi seluler ilegal, dengan transaksi industri ponsel per tahun mencapai Rp 50 triliun, dan diperkirakan sebanyak Rp 5 triliun⁸ dari pendapatan negara berpotensi hilang (PPN) akibat adanya perangkat telekomunikasi seluler ilegal. Oleh karena itu diperlukan registrasi IMEI (*International Mobile-station Equipment Identity*).

15. Banyaknya Serangan di Dunia Maya (Termasuk Situs Pemerintah)



Cyber security diartikan sebagai keamanan informasi yang diaplikasikan pada komputer dan jaringannya. Cyber security bertujuan untuk membantu user untuk mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Keamanan informasi merupakan isu yang penting mengingat pada tahun 2014 terdapat 48,4 juta serangan di dunia maya dan situs yang paling banyak diserang adalah situs yang memiliki domain go.id⁹.

16. Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Gov Pemerintah Pusat dan Daerah

E-Government (electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah yang berbasis internet, seperti portal, website, email, blog, dan lain-lain. Konsep yang diusung ini sebenarnya cukup baik, namun belum terintegrasinya database dan layanan *e-government*

⁸ APN
⁹ ID SIRTII

antara instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala dalam penerapan layanan e-government secara nasional¹⁰.

17. Makin Diminatinya Transaksi Jual Beli melalui Internet



Jumlah pengguna internet aktif di Indonesia yang mencapai 73 juta pengguna dimana 7%-nya melakukan transaksi jual-beli melalui internet¹¹. Hal ini mendorong terciptanya *e-commerce* yang makin diminati oleh masyarakat Indonesia. *E-commerce* sendiri diartikan sebagai proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer dan internet sebagai perantara transaksi bisnis¹². Pada tahun 2014, nilai transaksi e-commerce mencapai \$12 miliar atau Rp 150 triliun. Mengingat banyaknya peminat dan pemain dalam bidang ini, pemerintah menetapkan target untuk transaksi sampai dengan tahun 2016 mencapai \$24 miliar atau Rp 300 triliun.

18. Maraknya Konten Ilegal, Berbahaya, dan *Malware*



Maraknya konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, malware dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerusuhan antar suku atau agama, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir dalam upaya penanggulangan konten ilegal tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri tentang DNS Nasional.

¹⁰ RPI/MN 2015-2019

¹¹ Merkominfo, kominfo.go.id

¹² Laudon & Laudon 1998

19. Digitalisasi Penyiaran TV Berpotensi Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Spektrum Frekuensi, Infrastruktur Industri Penyiaran dan Membuka Peluang Usaha Baru



International Telecommunication Union (ITU) atau otoritas telekomunikasi internasional pada tahun 2006 batas akhir kepada seluruh negara di dunia agar paling lambat 17 Juni 2015 seluruh lembaga penyiaran melakukan penyiaran digital. Namun sebelumnya telah dilakukan uji coba di tahun 2006 yang hasilnya menetapkan standar DVB-T sebagai standar penyiaran yang akan diadopsi di Indonesia¹³.

Penyiaran TV Digital dapat meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi; efisiensi infrastruktur industri penyiaran; dan membuka peluang usaha baru bagi industri konten. Selain itu penerapan TV digital juga akan menghemat biaya listrik sebesar 94%, biaya modal (*Capital Expenditure*) sebesar 79% dan biaya operasional (*Operational Expenditure*) sebesar 57% dibandingkan dengan tetap menggunakan pemancar TV Analog. Dari sisi kualitas siaran, pemancar TV Digital juga meningkatkan kualitas penerimaan siaran bahkan dengan definisi tinggi (*High Definition TV*).

Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2013 sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong penerapan TV digital namun masih menemui kendala antara lain:

- a. Implementasi migrasi siaran TV Analog ke Digital (digitalisasi) memerlukan biaya tinggi bagi lembaga penyiaran lokal, komunitas, dan juga masyarakat kelas menengah kebawah, khususnya bagi lembaga penyiaran yang sudah berinvestasi tinggi dalam penyelenggaraan siaran analog. Karena dengan diberlakukannya digitalisasi menyebabkan infrastruktur analog tidak dapat digunakan lagi dan semua materi siaran akan diserahkan oleh Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing (LPPFM).
- b. Implementasi digitalisasi sistem penyiaran harus didasari regulasi yang kuat di level undang-undang sedangkan Indonesia belum memilikinya
- c. Belum dituntunya pengawasan sistem digital dan sanksi terhadap pelanggaran konten (program siaran)

¹³ Kominfo, 2012:1

C1. Program Legislasi Nasional

Potensi dan permasalahan terkait dengan regulasi bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Revisi UU ITE Terkait Pencemaran Nama Baik, serta Berbagai Hal Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik

Semakin bertambahnya pengguna Internet, termasuk makin besarnya jumlah penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari, telah melahirkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan politik. Selama ini, tantangan terbesar dalam penyusunan aturan terkait dengan penggunaan teknologi internet, adalah selalu tertinggalnya konsekuensi hukum dan sosial dari inovasi teknologinya. UU No. 11 Tahun 2008 yang diharapkan menjadi acuan dari seluruh kebutuhan di atas, apabila ditelaah rumusannya, justru kental nuansa pembatasan hak asasi manusianya, yang mengemuka dalam sejumlah pasal larangan. Ketentuan ini khususnya yang terejawantahkan dengan hadirnya ketentuan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*".

2. Perlunya Revisi UU Penyiaran Terkait Industri Penyiaran yang Sehat dan Sesuai dengan Karakter Bangsa

Demokratisasi penyiaran saat ini belum terwujud. Media penyiaran di Indonesia saat ini dapat memberikan pengaruh dalam membangun kesan/opini publik dan sangat dipengaruhi kepentingan bisnis dan politik pemilikinya. Berbagai acara/siaran yang mengudara tidak berdasarkan pada kriteria kelayakan sebuah siaran. Kegiatan penyiaran diarahkan untuk menarik iklan dan menentukan kelayakan acara tersebut melalui selera pasar dan rating. Banyaknya tayangan berbau mistis, pornografi dan pornoaksi, infotainment, serta reality show merupakan salah satu dampak dari dominannya pertimbangan pasar dalam menentukan materi siaran. Media penyiaran (terutama televisi) bersaing ketat dalam meraih pemirsa melalui rating dan share. Dengan adanya rating dan share sebagai acuan dalam penyusunan agenda, maka program televisi cenderung memuat konten yang kurang edukatif dan mengutamakan unsur hiburan. Bahkan program berita yang seharusnya mengedepankan aspek idealisme ikut menentukan rating dan share, hingga mendorong

media untuk memodifikasi berita-berita agar lebih menghibur untuk kepentingan menarik segmen pemirsa sebanyak-banyaknya. Hal ini menunjukkan bahwa pers dan media penyiaran belum seimbang, obyektif dan selektif dalam menyampaikan informasinya kepada masyarakat.

Selain itu Indonesia juga menghadapi permasalahan tren monopoli atau penguasaan media massa oleh kelompok pemilik modal tertentu. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur penyelenggaraan industri penyiaran yang sehat, serta konten siaran yang sesuai dengan karakter bangsa.

3. Perlunya RUU RTRI Terkait Pengembangan Lembaga Penyiaran Publik

UU Penyiaran maupun Peraturan Pemerintah dianggap belum dapat mengakomodir kebutuhan lembaga penyiaran publik dalam menjawab perkembangan dan tantangan dengan lembaga penyiaran yang lain. Bentuk kelembagaan LPP RRI dan LPP TVRI sebagai badan hukum dianggap tidak jelas sehingga mengalami kesulitan dalam dukungan APBN. Adanya paudangan tentang pendanaan LPP RRI dan LPP TVRI yang masih menggunakan mata anggaran 99 yang merupakan mata anggaran lain-lain sehingga tidak ada kewenangan bagi LPP RRI dan LPP TVRI untuk mengelola anggaran secara tersendiri mengingat LPP RRI dan LPP TVRI bukan merupakan satuan kerja secara tersendiri. Manajemen Dewan LPP RRI dan LPP TVRI dirasakan sangat dominan dalam pengelolaan LPP RRI dan LPP TVRI serta lemah dalam mewakili kepentingan publik. Adanya fenomena Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak ditindaklanjuti dengan peraturan mengenai kepegawaian di lingkungan LPP RRI dan LPP TVRI sehingga sudah lebih dari 15 tahun belum dapat melakukan recruitment SDM kreatif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa alasan yang menyatakan bahwa LPP RRI dan LPP TVRI harus dikeluarkan dari substansi dalam UU Penyiaran dan disusun undang-undang yang mengatur tentang penggabungan antara LPP RRI dan LPP TVRI yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI).

4. Perlunya Regulasi Perlindungan Data Pribadi; Migrasi Analog ke Digital; Konvergensi Telematika (Telekomunikasi); dan Pos

Urgensi penyusunan RUU Perlindungan Data dan informasi Pribadi adalah karena perlunya kepastian hukum perlindungan data pribadi sebagai wujud penegakan hak asasi manusia, perlunya penguatan hak subjek data atas pengelolaan data pribadi, serta sebagai upaya menciptakan *good governance* dan *clean government*.

Urgensi penyusunan RUU Migrasi Televisi Terrestrial dari Analog ke Digital adalah untuk mengatur spesifik terkait migrasi penyelenggaraan penyiaran analog ke digital, dan sebagai payung hukum *analog switch off*.

Urgensi penyusunan RUU Konvergensi Telematika (Revisi UU Telekomunikasi) adalah karena pesatnya perkembangan ITK yang menuntut penubaran pola pikir pada kebijakan tersebut.

Urgensi penyusunan Revisi UU Pos adalah untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pos, dan pelaksanaan pelayanan pos universal (menghadapi pembukaan akses pasar).

C2. Program Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

Potensi dan permasalahan terkait program internal Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai reformasi birokrasi dan revolusi mental adalah:

1. Transformasi Birokrasi Belum Terwujud Secara Nyata

Perubahan yang signifikan telah terjadi dalam tatanan pemerintahan. Pemerintah tidak saja harus mau dan bisa menerima kritik dan tuntutan tugas oleh reformasi, dengan pemangkasan wewenang dan berbagai tugas baru yang mana dalam hal ini pemerintah benar-benar harus melaksanakan praktik tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dan juga pemerintahan yang bersih (*clean government*), yang dalam pencapaiannya harus ada perubahan mendasar mencakup kelembagaan, sistem kerja, dan bahkan *mind-set* para pelakunya mulai dari pejabat tinggi sampai ke pegawai (bawahan). Salah satu penyebab belum terwujudnya reformasi karena transformasi birokrasi belum terwujud secara riil. Reformasi total tidak akan terjadi sebelum dilakukan perbaikan kinerja birokrasi. Namun, perbaikan kinerja tersebut tidaklah cukup dilakukan secara *Ad-hoc* atau parsial. Maka dari itu, konsep "*change management*" harus dipikirkan sebagai usaha mereformasi birokrasi secara

mendasar, sehingga meningkatkan kinerja organisasi dan individu.

Penelitian tentang *good governance* sebagai paradigma baru manajemen pembangunan menjadikan pemerintah sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa melalui kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan serta peran perencanaan dan penganggaran. Dalam *good governance*, tidak lagi hanya pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat berperan dalam pemerintahan, sehingga masyarakat akan terlibat untuk melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan (implementasi dan resiko) dan tindakan pemerintah, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap seluruh tindakan pemerintah.

2. Belum Adanya Riset Mengenai Dampak Sosial Ekonomi Terkait Implementasi Pitalabar Dalam Rangka Mempersiapkan Tenaga Kerja

Kondisi yang dihadapi saat ini adalah belum adanya riset mengenai dampak sosial dan ekonomi atas perkembangan TIK khususnya pitalabar untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam menghadapi perkembangan TIK khususnya pitalabar.

Ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalabar Indonesia (RPI) 2014—2019, bertujuan untuk memberikan arah dan panduan bagi perusahaan, percepatan, pembangunan pitalabar nasional yang komprehensif dan terintegrasi dengan menggunakan sumber daya secara efisien. Dengan dimulainya pembangunan pitalabar Indonesia, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah persiapan antara lain dengan melakukan kajian tentang kesiapan SDM angkatan kerja dalam rangka memanfaatkan peluang sekaligus mengantisipasi ancaman (jika ada) dari agenda rencana pembangunan pitalabar Indonesia.

3. Perubahan Paradigma Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan internal yang selama ini dilakukan masih menitikberatkan pada pengawasan yang bersifat *watchdog (mengungkap temuan)*, reaktif, post-audit, korektif, kaku, dan pasif sudah tidak relevan dilakukan, karena yang seharusnya dihindari adalah adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, sehingga diperlukan suatu paradigma baru dalam mekanisme pengawasan internal pemerintah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN



2.1 Rumusan

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015–2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015–2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015-2019.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015–2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015–2019, yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.



2.2 Rumusan Misi

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi

- dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
 3. mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
 4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
 5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
 6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
 7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



2.3 Tujuan

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.



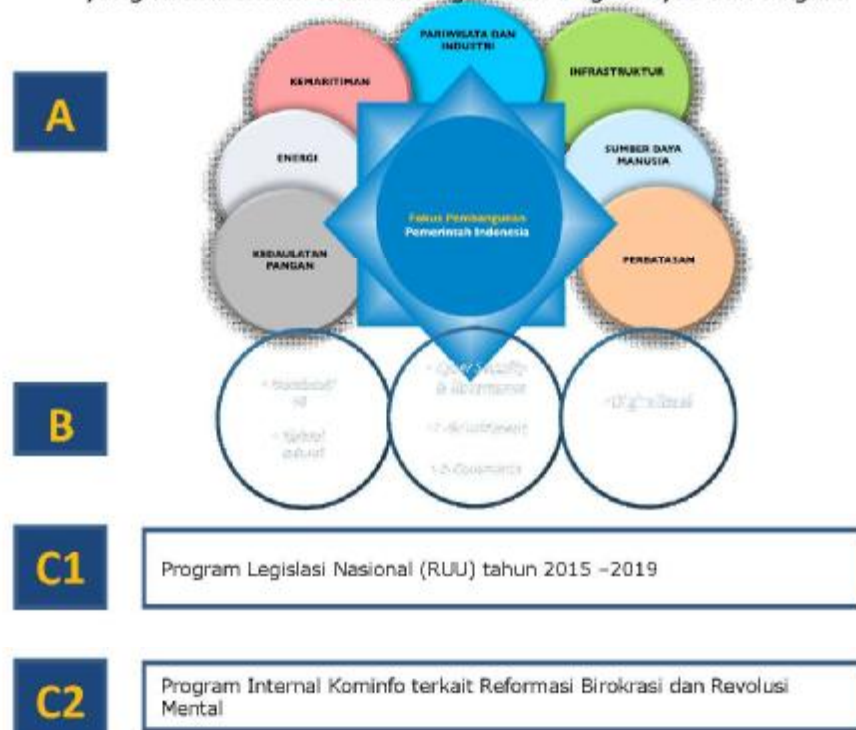
2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015—2019 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

- A. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan
- B. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran
- C. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran
- D. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Program Utama Kemenkominfo

Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara



Berdasarkan 4 fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut:

- SS.1 Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- SS.2 Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- SS.3 Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
- SS.4 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan komunikasi dan informatika di Indonesia harus menjadi gabungan antara pengembangan infrastruktur yang memadai dan tersedianya layanan Komunikasi dan Informatika di semua daerah, tidak terkecuali di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, hingga wilayah non-komersial lainnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, negara harus mengoptimalkan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dengan efisien dalam pemakaian sumberdaya dan efektif dalam aplikasi penggunaannya. Informasi yang dikelola dengan baik dan melibatkan sumber daya pitalebar (*bandwidth*) akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara sesuai dengan alam dan budayanya sehingga menjadi kekayaan yang sangat berharga. Pengetahuan itu dapat menjadi landasan dan berkontribusi bagi pembangunan berbagai sektor, seperti industri, pariwisata, maritim, energi, pertanian, dan pendidikan. Dengan arah kebijakan yang tepat, bidang komunikasi dan informatika akan berperan dalam mentransformasi masyarakat menuju masyarakat yang berdikari dan berdaya saing tinggi.

Sasaran lain dalam pembangunan komunikasi dan informatika adalah menyediakan layanan e government yang memadai disertai pengelolaan pusat data nasional sebagai kekayaan strategis bangsa. Dengan pelayanan berbasis elektronik, citra birokrasi yang bersih, profesional, dan siap melayani akan lebih mudah tercapai. Masyarakat juga dapat terlayani dengan lebih cepat, hemat waktu dan biaya, serta terukur dalam banyak hal, seperti pembiayaan hingga pelayanan tunggal satu pintu. Itulah yang menjadi salah satu hal penting dari sembilan agenda prioritas atau Nawacita pemerintah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat, minimal dengan tingkat literasi TIK nasional 75%.

Dengan tingkat literasi itu, pemanfaatan TIK untuk hal positif dan bermartabat akan menunjang kreativitas dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang melek TIK, akses masyarakat terhadap informasi publik akan meningkat.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda

prioritas yang disebut Nawacita yang kemudian diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan RPJMN Tahun 2015—2019, yaitu:

1. meneguhkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. menolok negara kearah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik;
8. melakukan revolusi karakter bangsa;
9. mempertahankan ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari sembilan agenda prioritas pemerintah tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada tiga agendaprioritas. Ketiga agenda tersebut adalah Nawacita-2, Nawacita-3 dan Nawacita-6.

NAWACITA-2: Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dalam RPJMN Tahun 2015—2019 disusun ke dalam 5 sub agenda prioritas, yaitu sebagai berikut :

1. melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
2. meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
3. membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
4. menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN); dan
5. meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada sub agenda prioritas 3), 4) dan 5).

Sub Agenda 3 Nawacita-2: Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah, meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah.

Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh antara lain :

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain : penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan penempatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
2. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain : penguatan kebijakan e government yang mengatur kelembagaan e government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/ penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
3. Penerapan open e government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran kodalam website masing masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi

Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

Sub Agenda 4 Nawacita-2: Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh antara lain :

1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan EB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten.

mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Sub Agenda 5 Nawacita-2: Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik

Sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya open government pada seluruh instansi pemerintah.

Untuk mencapai sasaran tersebut arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh antara lain:

1. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;
 - f. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;

- i. Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 - j. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP);
 - k. Dewan Pers; dan
 - l. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
2. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memantulkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

Sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik; dan meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

NAWACITA-3: Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan

Pengembangan kawasan perbatasan negara yang selama ini dianggap sebagai pinggiran negara, diarahkan menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (*security approach*), dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*), yang difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi.

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan 2015—2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan diberbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai

pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

Untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan tersebut ditempuh strategi pembangunan antara lain :

1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air dan telekomunikasi-informasi.
2. Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan dan kedaulatan telekomunikasi dan informasi di seluruh wilayah perbatasan negara

NAWACITA-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, di RPJMN Tahun 2015—2019 disusun ke dalam 11 sub agenda prioritas, yaitu sebagai berikut :

1. membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan;
2. membangun transportasi umum massal perkotaan;
3. membangun perumahan dan kawasan permukiman;
4. peningkatan efektivitas, dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur;
5. penguatan investasi;
6. mendorong BUMN menjadi agen pembangunan;
7. peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi;
8. akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional;
9. pengembangan kapasitas perdagangan nasional;
10. peningkatan daya saing tenaga kerja; dan
11. peningkatan kualitas data dan informasi statistik dalam sensus ekonomi tahun 2016.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada sub agenda prioritas 1).

Sub Agenda 1 Nawacita-6: Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan

Beberapa sasaran yang ingin diwujudkan untuk membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. tersedianya layanan komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah

- non komersial lainnya melalui, jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 persen di wilayah USO;
2. tersedianya layanan pitalebar dengan tujuan:
 - a. terhubungnya jaringan tulang punggung serat optik nasional di seluruh pulau besar dan kabupaten/kota;
 - b. tingkat penetrasi *fixed pitalebar* di perkotaan 71 persen rumah tangga dan 30 persen populasi, di perdesaan 49 persen rumah tangga dan 6 persen populasi; dan
 - c. tingkat penetrasi *mobile pitalebar* (1 Mbps) di perkotaan 100 persen dan di perdesaan 52 persen.
 3. pengoptimalisasian pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit melalui:
 - a. migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital selesai (*analog switch off*); dan
 - b. tersedianya alokasi spektrum frekuensi yang mendukung layanan pitalebar.
 4. tercapainya tingkat literasi TIK nasional sebesar 75 persen; dan
 5. tersedianya layanan *e-Government* dan dikelolanya data sebagai asset strategis nasional melalui:
 - a. indeks *e-Government* nasional mencapai 3,4 (skala 4,0); dan
 - b. jumlah pegawai pemerintah yang paham TIK menjadi 100 persen.

Dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) menjadi *pitalebar-ready* dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan dana USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem pitalebar (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola Dana USO;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas melalui:
 - a. Penataan ulang alokasi spektrum frekuensi (spektrum reforming) dengan prinsip netralitas teknologi;
 - b. Optimalisasi frekuensi dan jaringan infrastruktur wireless pada instansi Pemerintah dengan implementasi konsep Government Radio Network (GRN);
 - c. Konsolidasi infrastruktur dan spektrum bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler, FWA, dan BWA maupun lembaga penyiaran dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang berkeadilan;
 - d. Memastikan migrasi TV analog ke digital sesuai jadwal yang ditetapkan;

- e. Mempercepat ketersediaan spektrum di sub-1 GHz termasuk alokasi frekuensi digital dividend yang memadai untuk mempercepat distribusi *pitalebar*;
 - f. Mendorong penggunaan spektrum frekuensi secara dinamis dan fleksibel: *spektrum sharing*, *spektrum consolidation*, *mobile virtual network operator* (MVNO);
 - g. Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional termasuk frekuensi maupun slot orbit, mendorong kerjasama dengan industry satelit global, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan efisiensi spektrum; dan
 - h. Mengkaji pembangunan satelit *pitalebar* nasional;
3. Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective melalui:
- a. Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
 - b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);
 - c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi.
 - d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.



3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika

A. Program Kominfo yang Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia



1. Mewujudkan Konektivitas Pitalobar Nasional

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan konektivitas pitalobar nasional adalah:

Terkait Universal Service Obligation (USO):

- a. Redesain USO
 - Menyusun bisnis model redesain
 - Menetapkan pemenuh tentang redesain USO
- b. Penyelenggaraan 3 pilot sistem desa pitalobar terpadu di desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman sesuai 50 lokasi prioritas BNPP
- c. Penyelenggaraan sistem desa pitalobar terpadu (desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman) di 50 lokasi prioritas BNPP
- d. Membangun 575 BTS di daerah tertinggal, terluar dan terpencil
- e. Menyediakan akses internet di 4000 lokasi (sesuai prioritas, seperti 100% sekolah SD-SMA termasuk madrasah)
- f. Revitalisasi dan optimalisasi National Internet Exchange (NIX)

Non-Universal Service Obligation (Non-USO):

- a. Design TIK environment sebagai acuan di area fokus pembangunan
- b. Koordinasi lokasi prioritas dengan K/L terkait dengan penyelenggara telekomunikasi
- c. Membuat kebijakan yang memberikan insentif kepada operator untuk memusatkan pengembangannya ke lokpri sektor unggulan sesuai model
- d. Memfasilitasi dan memonitor implementasi
- e. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA) ke 1000 desa
- f. Pembentukan 1500 agen perubahan Internet Cerdas, Kreatif, dan Produktif (i-CAKAP) di daerah perbatasan, tertinggal, dan terluar.

2. Mewujudkan Pemerintah sebagai Government Public Relation (GPR)

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan kebijakan pemerintah sebagai GPR adalah:

- a. Pemerintah sebagai penentu agenda (agenda setting) isu-isu di masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya
- b. Membentuk lembaga jejaring komunikasi
- c. Menyusun dan memantau implementasi regulasi tentang GPR oleh K/L/D
- d. Menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik ke seluruh Indonesia

3. Mendukung Revolusi Mental

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendukung revolusi mental adalah:

- a. Menyusun strategi komunikasi dalam rangka efektifitas diseminasi informasi tentang revolusi mental
- b. Diseminasi informasi ke seluruh pelosok Indonesia terkait revolusi mental
- c. Edukasi dan advokasi kepada K/L/D, ormas, dan media mengenai revolusi mental

B. Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Sebagai *Leading Sector*



1. Pengembangan Infrastruktur Pita Lebar termasuk Layanan 4G

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pengembangan infrastruktur pita lebar termasuk layanan 4G adalah:

- a. Menata Sumber Daya spektrum frekuensi radio
- b. Menjaga keberlangsungan orbit satelit Indonesia, agar tetap menjadi milik dan kendali Indonesia
- c. Menggelar jaringan tulang punggung serat optik nasional (Palapa Ring) untuk menghubungkan 497 kab/kota di Indonesia

2. Efisiensi industri telekomunikasi

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong efisiensi industri telekomunikasi adalah:

- a. Mendorong operator telekomunikasi untuk berkonsolidasi dalam rangka efisiensi industri telekomunikasi
- b. Membangun infrastruktur pasif bersama (*Passive infrastruktur sharing*) dalam rangka meringankan biaya investasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi
- c. *E-Licensing* Spektrum Radio (*Machine to Machine*)

3. Mendorong Peningkatan Jumlah Kandungan Dalam Negeri pada Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong peningkatan jumlah kandungan dalam negeri pada alat dan perangkat telekomunikasi merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap industri telekomunikasi. Strateginya adalah dengan memantau dan mengawasi implementasi regulasi tentang TKDN alat dan perangkat telekomunikasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi impor alat dan perangkat telekomunikasi yang menjadi salah satu pemicu defisit neraca perdagangan.

4. Mengintegrasikan Nomor Panggilan

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengintegrasikan nomor panggilan untuk menghadapi keadaan darurat nasional adalah dengan menyediakan nomor panggilan tunggal darurat (*single emergency number*).

5. Penataan Registrasi Prabayar

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mencegah penipuan melalui layanan telekomunikasi adalah dengan menyusun kebijakan/regulasi tentang tata cara registrasi dan aktivasi kartu prabayar serta tata niaga distribusi kartu prabayar.

6. Mengurangi Peredaran Perangkat Telepon Selular Ilegal

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengurangi peredaran perangkat telepon selular ilegal yang berpotensi merugikan negara dalam hal kontribusi pajak, adalah dengan:

- a. Merumuskan strategi/kebijakan penataan registrasi IMEI untuk perangkat
- b. Memastikan kepatuhan dan penegakan hukum pelanggar registrasi IMEI

7. Meningkatkan Keamanan Informasi dan Optimalisasi Tata Kelola Internet

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan keamanan informasi dan optimalisasi tata kelola internet, adalah dengan:

- a. Menyiapkan rujukan standardisasi *security* untuk sektor strategis
- b. Menerapkan Sertifikasi sistem elektronik strategis
- c. Pembentukan Panel untuk penanganan situs bermuatan negatif
- d. Pemberian tanda daftar sistem penyelenggaraan elektronik
- e. Penyusunan dan pengesahan Permohonan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSSE) dan Permohonan Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK)

8. Mendorong Pertumbuhan *e-Commerce*

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong pertumbuhan *e-commerce* nasional, adalah dengan:

- a. Merumuskan *Roadmap e-Commerce* Nasional untuk 5 – 10 tahun ke depan
- b. Melakukan pengumpulan data proliferasi *e-commerce*.
- c. Mendorong pengembangan dan peningkatan jumlah *start up company*

9. Menerapkan DNS dalam Rangka Mengurangi Konten Ilegal

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan DNS dalam rangka mengurangi konten ilegal, berbahaya, dan malware, adalah dengan:

- a. Menetapkan Permen tentang DNS Nasional (Tersedianya DNS Nasional).
- b. Diharapkan 4 penyelenggara jaringan telekomunikasi sudah menerapkan DNS Nasional pada Q4 2015.
- c. Implementasi DNS Nasional secara menyeluruh.

10. Mengintegrasikan Layanan e-Government

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengintegrasikan layanan e-government nasional, adalah dengan:

- a. Menyusun masterplan dan memastikan penetapan perpres e-government sebagai dasar penerapan layanan e-government.
- b. Mendorong tercapainya index PeGI Nasional 3,4
- c. Integrasi database dan layanan e-government di instansi pemerintah

11. Mempercepat Proses Migrasi TV Analog ke Digital

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mempercepat proses migrasi TV analog ke digital (digitalisasi), adalah dengan:

- a. Menyusun kebijakan/regulasi percepatan migrasi TV analog ke digital.
- b. Memastikan migrasi TV analog ke digital selesai sesuai jadwal *switch off* [2018].
- c. Mendorong percepatan revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR.

C1. Program Legislasi Nasional

1. Memastikan Terelesaikannya Revisi UU ITE

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun revisi UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, adalah dengan:

- a. Konsolidasi naskah akademik tentang UU ITE dengan seluruh stakeholder
- b. Menyampaikan naskah akademik dan RUU perubahan kepada DPR melalui Presiden

2. Penyusunan Revisi UU Penyiaran Bersama DPR

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun Revisi UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, adalah dengan:

- a. Menyusun naskah akademik dan daftar inventarisasi masalah dengan melibatkan partisipasi publik dan seluruh stakeholder sebagai bahan pembahasan dengan DPR
- b. Menyusun rancangan perundang-undangan sebagai pelaksana turunan undang-undang.

3. Penyusunan RUU RTRI Bersama DPR

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI), adalah dengan menyusun naskah akademik dan daftar inventarisasi masalah dengan melibatkan partisipasi publik dan seluruh stakeholder sebagai bahan pembahasan dengan DPR.

4. Memastikan Terelesaikannya RUU Bidang Komunikasi dan Informatika

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun beberapa RUU bidang komunikasi dan informatika, adalah dengan menyusun naskah akademik sebagai bahan pembahasan dengan DPR terkait :

- a. Perlindungan data pribadi
- b. Migrasi Televisi Terrestrial dari Analog ke Digital
- c. Konvergensi Telematika (Revisi UU Telekomunikasi)
- d. Pos

C2. Program Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

1. Merubah paradigma birokrasi dari perizinan menjadi pelayanan, dengan melakukan program *change management*

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam merubah paradigma pelayanan dengan melakukan program *change management*, adalah dengan:

- a. Latmelung budaya organisasi reformasi birokrasi dan pelayanan kekominfo
- b. Menetapkan Permenn tentang pelayanan publik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk mendorong ASN Kementerian Komunikasi dan Informatika agar berorientasi pelayanan
- c. Menerapkan implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh di Kementerian Komunikasi dan Informatika
- d. Menyusun sistem dan mekanisme partisipasi publik dalam hal kebijakan dan anggaran
- e. Mempercepat proses perizinan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- f. Memastikan indeks PeGI Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan target rata-rata nasional

2. Melakukan Kajian Terkait Kesiapan Masyarakat dalam Penerapan Pitalebar

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan kajian terkait kesiapan masyarakat untuk penerapan pitalebar, adalah dengan:

- a. Menyusun desain riset, studi literatur, dan pemetaan terhadap *stakeholder*
- b. Analisa dan penyusunan rekomendasi hasil riset terkait kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi pitalebar

3. Menerapkan metode *Risk Based Internal Audit Program*

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan metode *Risk Based Internal Audit Program*, adalah dengan:

- a. Pengawasan terhadap proses pengadaan
- b. Review atau evaluasi atas pengelolaan IPNIP dan anggaran
- c. Audit kinerja atas program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika

- d. Audit atas pengelolaan BMN (termasuk hibah)
- e. Pendampingan atas penyusunan Laporan Keuangan
- f. Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal



3.3 Kerangka Regulasi

Dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 untuk mendukung tercapainya agenda pembangunan bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama DPR akan menyusun beberapa regulasi sebagai berikut:

NO.	JUDUL RUU	RENCANA PEMBAHASAN					KETERANGAN
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	RUU tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	✓					Inisiatif Pemerintah
2	RUU tentang Radio Televisi Indonesia	✓					Inisiatif DPR
3	RUU tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	✓					Inisiatif DPR
4	Rancangan UU tentang Perlindungan Data Pribadi		✓				Inisiatif Pemerintah

NO.	JUDUL RUU	RENCANA PEMBAHASAN					KETERANGAN
		2015	2016	2017	2018	2019	
5	RUU Migrasi Televisi Terestrial dari analog ke Digital		✓				Inisiatif Pemerintah
6	RUU tentang konvergensi Telematika (Revisi UU Telekomunikasi)			✓			Inisiatif Pemerintah
7	Rancangan UU tentang Pembaharuan UU No.38 Tahun 2009 tentang Pos				✓		Inisiatif Pemerintah

Selain matriks diatas, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyusun:

- Regulasi penggunaan spektrum secara dinamis dan fleksibel, Kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika
- RPP/PPDS, Peraturan perundang-undangan di bidang e-Business, Regulasi/kebijakan di bidang e-Government, Peraturan perundang-undangan tata kelola pemberdayaan industri TIK, Peraturan perundang-undangan di bidang Pemberdayaan Informatika, Kebijakan/ regulasi Keamanan Informasi
- Rancangan regulasi SKKNI bidang kominfo
- Regulasi dasar untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik, Kebijakan dan standarisasi di bidang komunikasi dan informasi publik, Keppres tentang kewajiban Lembaga Penyiaran untuk menyediakan durasi kampanye revolusi mental dan restorasi sosial melalui PSA, Kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik dalam rangka mendorong konten lokal yang berbasis edukasi, Perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan informasi internasional.



3.4 Kerangka Kelembagaan

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Kerangka kelembagaan

merupakan perangkat Kementerian/ Lembaga (struktur organisasi, keratalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil Negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan dilakukan dengan memperhatikan:

1. Perubahan pola rezim perijinan ke rezim pelayanan
2. Arah dan Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang fokus kepada sektor telekomunikasi, tata kelola internet dan digitalisasi siaran televisi
3. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan komunikasi dan informatika
4. Tata laksana dan sumber daya Aparatur Sipil Negara.

2. Penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan poin di atas, maka akan dilakukan penataan pada organisasi pusat, dan unit pelaksana teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah, serta penguatan SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Langkah penguatan kelembagaan antara lain:

1. Dalam rangka percepatan implementasi teknologi *pitalebar* (*pitalebar*) dan pengembangan ekosistemnya perlu dibentuk organisasi unit eselon II yang khusus menangani *pitalebar*.
2. Badan Layanan Umum Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika sebagai eksekutor dari penyediaan infrastruktur TIK di daerah non komersial (LISD) yang selama ini merupakan Unit Kerja Eselon III, perlu ditingkatkan kapasitasnya mengingat tanggung jawab dan luasnya lingkup pekerjaan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



4.1 Target Kinerja

Pada tahun 2015—2019 pembangunan komunikasi dan informatika akan menitikberatkan kepada 4 (empat) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

Sasaran Strategis/ IKS		2015	2016	2017	2018	2019
SS.1.	<i>Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan</i>					
IKS.1	Jumlah pembangunan sarana/ Tugu Berkode Pos di wilayah perbatasan dan pulau terdepan di Indonesia	20 Tugu Berkode Pos	50 tugu berkode pos	Monev tugu berkod e pos	Monev tugu berkod e pos	Monev tugu berkod e pos
IKS.2	Persentase (%) penyelesaian Redesain USO	100% (Penyelesaian Regulasi terkait Redesain USO)	Monev Redesai n USO	Monev Redesai n USO	Monev Redesai n USO	Monev Redesai n USO
IKS.3	Jumlah BTS yang dibangun di daerah <i>blankspot</i> layanan telekomunikasi (Vertikal, Terluas & Terpencil)	125 BTS	125 BTS	125 BTS	125 BTS	125 BTS

Sasaran Strategis/ IKS		2015	2016	2017	2018	2019
IKS.4	Jumlah penyediaan akses <i>pitalebar</i> internet	800 Lokasi (Sesuai prioritas SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalamau)	800 Lokasi (Sesuai prioritas SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalamau)	800 Lokasi (Sesuai prioritas SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalamau)	800 Lokasi (Sesuai prioritas SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalamau)	800 Lokasi (Sesuai prioritas SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalamau)
IKS.5	Persentase (%) tersedianya satelit <i>pitalebar</i> Nasional	100% (Kajian Feasibility Study)	100% (tender penyedia satelit)	40% Penyediaan Satelit dan sarana dan infrastruktur	60% Penyediaan Satelit dan sarana dan infrastruktur	100%
SS.3	<i>Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan</i>					
IKS.1	Persentase (%) ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung layanan akses bergerak <i>pitalebar</i>	20 MHz	70 MHz	70 MHz	90 MHz	100 MHz

Sasaran Strategis/ IKS		2015	2016	2017	2018	2019
IKS.2	Persentase (%) kab/kota yang terhubung Jaringan tulang punggung serat optik nasional palapa ring	Persiapan regulasi, Dokumen lelang dan pelaksanaan lelang, dan Ground breaking Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring untuk 51 Kab/kota tertinggi	Penggelaran palapa ring di 26 kab/ Kota	Penggelaran palapa ring di 25 kab/ko ra (100% di 51 Kab/ko ta)	Monev Palapa Ring	Monev Palapa Ring
IKS.3	Persentase (%) selesainya migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital	100% Penyelesaian Regulasi TV Digital	menjadi 80% (sulawesi)	menjadi 90% (MALU, KU +PAPU, A- Bangka Belitung + Gorontalo)	menjadi 100% (NATION WIDE ANALOG SWIFT HDTV)	Monev TV digital
IKS.4	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan nomor panggilan tunggal darurat nasional (<i>single public emergency number</i>)	Implementasi di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota	Implementasi di 120 Kab/ Kota	Implementasi di 120 Kab/ Kota	Implementasi di 120 Kab/ Kota	Implementasi nasional

Sasaran Strategis/ IKS		2015	2016	2017	2018	2019
IKS.5	Persentase (%) Kab/Kota yang memiliki infrastruktur pasif telekomunikasi melalui supervisi Kemenkominfo	Pembangunan 3 kota lokasi pengembangan infrastruktur pasif bersama	Pembangunan 5 kota pengembangan infrastruktur pasif bersama	Monev infrastruktur pasif telekomunikasi	Monev infrastruktur pasif telekomunikasi	Monev infrastruktur pasif telekomunikasi
IKS.6	Persentase (%) penelaahan dan inspeksi/evaluasi Permenkominfo tentang TKDN 4G LTE	100% (ditelaahnya permenkominfo tentang TKDN 4G LTE)	100% (persiapan menjelang implementasi)	100% (implementasi permen)	Monev Permen Kominfo tentang TKDN 4G LTE	Monev Permen Kominfo tentang TKDN 4G LTE
IKS.7	Persentase (%) instansi pemerintah yang terintegrasi layanan e-government Nasional	100% (masterplan arsitektur e-Government Nasional)	Monev integrasi e-gov	Monev integrasi e-gov	Monev integrasi e-gov	Monev integrasi e-gov
IKS.8	Jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mengimplementasikan DNS Nasional	1 penyelenggara	Monev implementasi DNS Nasional	Monev implementasi DNS Nasional	Monev implementasi DNS Nasional	Monev implementasi DNS Nasional

Sasaran Strategis/ IKS		2015	2016	2017	2018	2019
IKS.9	Persentase (%) peningkatan perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan komunikasi dan informatika (ID-SIRTI dan KAMINFO)	100%	100%	100%	100%	100%
SS.3	<i>Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman</i>					
IKS.1	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi	4 dokumen regulasi / kebijakan	Monev regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi	Monev regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi	Monev regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi	Monev regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi
IKS.2	Jumlah Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan <i>National Chief Information Officer (NCIO)</i>	1 PM	Implementasi, pemantauan dan pelaksanaan permen	Monev Permen terkait NCIO	Monev Permen terkait NCIO	Monev Permen terkait NCIO

Sasaran Strategis/ IKS		2015	2016	2017	2018	2019
IKS.3	Jumlah Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan	2 PM	Implementasi, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan permen	Monev Permen terkait sertifikasi elektro nik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan	Monev Permen terkait sertifikasi elektro nik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan	Monev Permen terkait sertifikasi elektro nik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan
IKS.4	Jumlah regulasi untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik	6 regulasi	Implementasi dan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan	Monev regulasi terkait penyebaran dan pemerataan informasi publik	Monev regulasi terkait penyebaran dan pemerataan informasi publik	Monev regulasi terkait penyebaran dan pemerataan informasi publik
IKS.5	Jumlah regulasi terkait implementasi <i>Government Public Relations (GPR)</i>	5 regulasi	Implementasi dan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan	Monev regulasi terkait GPR	Monev regulasi terkait GPR	Monev regulasi terkait GPR

Sasaran Strategis/ IKS		2015	2016	2017	2018	2019
IKS.6	Jumlah kebijakan terkait diseminasi Kampanye Nasional Revolusi Mental	2 kebijakan	Implementasi dan pemantauan serta pelaksanaan kebijakan	Monev kebijakan terkait revolusi mental	Monev kebijakan terkait revolusi mental	Monev kebijakan terkait revolusi mental
SS.4	<i>Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien</i>					
IKS.1	Persentase (%) rekomendasi kebijakan berbasis penelitian/kajian (termasuk studi dampak sosial ekonomi implementasi <i>pitulebar</i> , <i>intanet</i> , dan Digitalisasi Penyiaran)	30% (dari 20 dokumen)	30% (dari 20 dokumen)	30% (dari 20 dokumen)	30% (dari 20 dokumen)	30% (dari 20 dokumen)
IKS.2	Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, <i>bintek</i> , dan <i>Tot</i> SKKN bagi angkatan kerja muda	7.575 orang	1.250 orang	1.150 orang	1.150 orang	1.150 orang
IKS.3	Jumlah Rancangan Regulasi SKKN Bidang Kominfo	1 RSKKN	1 RSKKN	1 RSKKN	1 RSKKN	1 RSKKN

Sasaran Strategis/ IKS		2015	2016	2017	2018	2019
IKS.4	Jumlah peserta bintek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas	2.500 peserta	4100 peserta	5100 peserta	6100 peserta	7100 peserta
IKS.5	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKS.6	Persentase (%) pencrapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemendikominfo	100% (2 satker utama)	100%	100%	100%	100%
IKS.7	Persentase (%) terselesaikannya pelaksanaan kebijakan <i>Change Management</i>	100%	100%	100%	100%	100%
IKS.8	Persentase (%) tersedianya sistem dan mekanisme Partisipasi Publik (Planning, design, execution dan monitoring) anggaran dan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%



4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka memenuhi target kinerja dan berkontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode tahun 2015-2019 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika akan bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (Non BLU), PNBP BLU dan juga Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Selain sumber pendanaan di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk mendanai program kerja utama seperti pembangunan Palapa Ring.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014—2019 dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahun 2014—2019 merupakan pelaksanaan rencana strategis pada masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014—2019. Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal sampai dengan tahun 2014 akan dikompensasi pada pelaksanaan rencana strategis tahun 2015—2019. Karena itu, penyusunan rencana strategis tahun 2015—2019 menjadi suatu kegiatan yang sangat penting. Kegagalan pencapaian sasaran pada tahun-tahun awal pelaksanaan rencana strategis menyebabkan sasaran rencana strategis tidak tercapai. Rencana strategis tahun 2015—2019 dilaksanakan dengan mengacu pada capaian strategis tahun 2010—2014 menyelaraskan visi dan misi Jalan Perubahan yang diusung pemerintahan saat ini melalui program prioritas Nawacita serta mengantisipasi kondisi dinamis lingkungan global. Rencana kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terdapat di rencana strategis tahun 2015—2019 dan anggaran yang dibutuhkan telah berhasil disusun dengan dilengkapi prognosis agar jelas apakah setiap sasaran strategis sudah ada yang melaksanakannya atau belum.

Target pencapaian Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 menantang dan mengharuskan semua elemen bekerja keras dan bersinergi agar semua target tersebut tercapai. Agar seluruh kegiatan berada pada jalur yang benar, pelaksanaan rencana strategis perlu dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Untuk itu, dilakukan rapat kerja evaluasi pencapaian target triwulan, semesteran, dan tahunan serta diprimalkan dengan Laporan Kinerja (LKJ).



MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2015 - 2019
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE KL PROG KES	PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	LOKASI	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
09	KEWENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									0,00	3,93	3,39	3,39	3,93	25,994	
03	06	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN													3.180,5	
03	06		terjaminnya sumber daya frekuensi radio untuk program Cita Cakra Standby untuk seluler 4G LTE													
03	06		Persentase (%) ketersediaan kapasitas frekuensi seluler 350 MHz untuk mobile broadband	57%	30%	50%	70%	100%								
03	06		Persentase (%) penyesuaian penggunaan spektrum seluler Industrial	90%	92%	93%	94%	95%								
03	06		Persentase (%) pengalihan hakul penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika	80%	92%	93%	94%	95%								
03	06		terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat dan dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku pemerintahan													



KODE		PROGRAM KESEKUTUPAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2016 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
08	06			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Pemungkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Pemungkat Telekomunikasi	76	81	82	84	85							
09	06			Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Pemungkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Pemungkat Telekomunikasi	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9							
			Meningkatkan daya saing industri telekomunikasi dalam negeri													
				Persentase (%) penetapan dan implementasi Permesyarakat jaring TETRA 4G LTE	100% (jaringan nasional yang TETRA 4G LTE)		100% (implementasi di 30% Subsidir, 40% Base Station)									
			Peningkatan Pelayanan Perijinan ISIR	Persentase (%) penyelesaian layanan ISIR untuk Perijinan ISIR Microwave Link	100%											
			Terwujudnya orbit satelit seperti satelit	Persentase (%) terpagunya keberlangsungan satelit Indonesia yang sudah teruji di ITU	100%	100%	100%	100%	100%							
			Terwujudnya radio satelit yang standard dan													



KODE		PROGRAM KESKATAN PRIORITAS	SARAFAT	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				KBO	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
				Persentase (%) tersedianya percontohan perangkat desa selayer untuk Desa Melayan di 12000; Prosesi BHP-EXP mangasahan dasa (10)	100%											
				Persentase (%) tersedianya prototipe Rukio Melayan yang siap diprosuksi masal nar sayo dibarengi dengan harga terjangkau dan memenuhi standar nasional	100%											
02B	06	3052	Kelembagaan Layanan Persepsi dan Kelirora Perangas, Eks dan sistematis													457,8
04B	06	3052	Menyuguhkan layanan peragaan dan kelirora perangas pro, sistematis													447,8
00B	05	3052		Persentase (%) ayunan pengujian perangkat pos dan	80%	90%	90%	90%	90%							
00B	05	3052		Persentase (%) keasutan sistematis tanggapan dan nilai esai cerper penyataan teori dan standar (10)	90%	90%	90%	90%	90%							
				Persentase (%) jumlah hasil kultural perangkat pos dan sistematis	90%	90%	90%	90%	90%							
				Layanan administratif dan dukungan teknis	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan							
04B	06	3053	Pelaksanaan Monev dan Vilisiu dan Perangas Perangas dan Sistem Daps "2a dan sistematis													41,7,8



KODE		PROGRAM/KEKASIHAN PRIORITAS	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
008	05	3053		Terwujudnya layanan dan kepuasan penyusunan aplikasi dan perangkat lunak serta peningkatan infrastruktur SIMS dan infrastruktur mobile data											217,6	
001	05	3053		Diseminasi (%) tanggapan koakurasi layanan radio yang mematuhi regulasi	80%	80%	80%	80%	80%							
				Penyediaan penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio layanan administrasi dan dukungan teknis	90%	90%	90%	90%	90%							
009	06	3054	Realisasi Layanan Pemasangan Perangkat dan Perangkat Lunak												127,4	
				Terwujudnya Efisiensi dan Peningkatan Perjanjian GR, pencapaian hasil dalam perjanjian GR (Program N201), peningkatan pendapatan GRPP, yang benar-benar dilaksanakan												
009	05	3054	Terwujudnya pelayanan pelanggan layanan secara cepat, tepat dan pasti sehingga hasil pemenuhan tercapai	Jumlah pengaduan layanan pelanggan yang tercapai layanan pelanggan sesuai dengan ketentuan spesifikasi layanan radio (N201)	100%	-	-	-	-						95,6	



KODE		PROGRAM/KESEKUTAN PRIORITAS	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
01a	01	305a		Persentase (%) capaian pelayanan proses perizinan telekomunikasi radio	85%	85%	87%	90%	90%							
01b	01	305a		Persentase (%) pelayanan pelanggan telekomunikasi radio yang tepat waktu	80%	85%	87%	90%	90%							
01c	01	305c		Terwujudnya pelayanan sertifikasi operator radio secara cepat, tepat dan pasti sehingga dapat memuaskan											40,8	
01d	01	305a		Persentase (%) capaian pelayanan proses sertifikasi operator radio	85%	85%	87%	90%	90%							
01e	01	305a		Persentase (%) pelayanan jumlah operator radio yang memperoleh lisensi radio	80%	85%	87%	90%	90%							
01f	01	305a		Optimalnya pengelolaan dan peningkatan EHP kawasan radio											19,1	
01g	01	305a		Persentase (%) pencapaian target PHSR	100%	100%	100%	100%	100%							
02a	02	3000	Pengembangan Pamarfester, Sistem Menu dan Perangkat Lunak dan Informatika	Terwujudnya Efisiensi dan Peningkatan Perbaikan RR pencapaian hasil dalam pejamin ICR (Program ICR), peningkatan pencapaian PHSR											875,4	
02b	02	3000		Persentase (%) implementasi dan pemantauan infrastruktur dan aplikasi layanan on line SMS	100% (berdasarkan layanan ICR) dalam SIMQ	100% (berdasarkan layanan ICR) dalam SIMQ	100% (berdasarkan layanan ICR) dalam SIMQ	100% (berdasarkan layanan ICR) dalam SIMQ	100% (berdasarkan layanan ICR) dalam SIMQ							



KODE		PROGRAM KEKATAN PRIORITAS	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				KBO	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
00	00	3000		Optimasi layanan dan kepuasan pengguna spektrum dan perangkat informasi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui dukungan infrastruktur SDIS dan infrastruktur monitoring yang memadai											0,0	
00	00	3000		Peningkatan kemampuan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio	81%	82%	83%	84%	85%							
00	00	3000		Peningkatan kegiatan pemantauan gangguan perangkat telekomunikasi dan informasi	81%	82%	83%	84%	85%							
00	00	3000		Peningkatan implementasi dan operasi infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)	80% (tidak dengan gangguan frekuensi tertinggal)	80% (tidak dengan gangguan frekuensi tertinggal)	81% (tidak dengan gangguan frekuensi tertinggal)	82% (tidak dengan gangguan frekuensi tertinggal)	83% (tidak dengan gangguan frekuensi tertinggal)							
02	00	3000	PERENCANAAN, RENCANA, Spektum, Frekuensi Radio, dan Data Service												32,1	
00	00	3000		Wawasan spektrum frekuensi sesuai dengan kepentingan nasional dan internasional dengan keterpaduan												32,2
00	00	3000		Peningkatan kapasitas bidang penggunaan spektrum radio dinamis dan fleksibel (FD untuk Spektrum Flexibily)	20%	30%	60%	70%	100%							
00	00	3000		Peningkatan ketersediaan spektrum untuk kapasitas nasional secara dinamis	30%	60%	70%	100%	100%							



KODE		PROGRAM/KESEKUTAN/PRORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
056	05	3066		Persentase (%) keterisian alokasi spektrum frekuensi radio dalam rangka migrasi teknologi radio komunikasi Dinas Maritim dan analog ke-digital	25%	30%	50%	70%	100%							
059	05	3066		Persentase (%) keterisian alokasi spektrum frekuensi radio dalam rangka mendukung program Jambal Indonesia atau P2DR (Public Response Disaster Readiness)	25%	30%	50%	70%	100%							
014	05	3066	tersebarnya alat alat dan pita frekuensi untuk keperluan satelit multinasional												34,4	
059	05	3066		Persentase (%) sekapangannya radio komunikasi satelit Indonesia yang sudah terotifikasi di ITU	100%	100%	100%	100%	100%							
014	05	3066		Jumlah utilitas penggunaan frekuensi radio	36	40	46	60	66							
014	05	3066	termanajemen sumber daya frekuensi radio secara optimal dan efisien untuk mendukung program Cita Citra (Berkembang untuk Rakyat) ID (www.kominfo.go.id)												34,9	
056	05	3066		Persentase (%) penambahan spektrum frekuensi sumber daya untuk mobile broadband	5,7% (2 x 55 MHz)	30%	50%	70%	100%							
020	05	3067	Pertanian dan Perkebunan, Sains dan Teknologi, Pendidikan, Layanan Publik dan Informatika												156,0	



KODE		PROGRAM/KESEKUTAN PRIORITAS	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
008	08	3057		Walaupun standar alat dan perangkat elektronik yang mendukung keamanan teknologi nasional di bidang wireless broadband yang beroperasi lingkungan (Green IT)											156,9	
008	08	3057		Jumlah kegiatan dan kegiatan seminar pose dan informatika	10 draft, 1 regulasi tentang Peraturan Regulasi BIC untuk Perangkat Seluler	10 draft	10 draft	10 draft	10 draft							
008	08	3057		Penelitian (R) portofolio alat dan perangkat elektronik yang diterbitkan	75%	72%	76%	76%	80%							
008	08	3057		Jumlah pre-prototipe dan prototipe produk dalam negeri bidang elektronik	4 Prototipe - Tersedianya prototipe radio keselamatan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan nelayan - Tersedianya prototipe keselamatan nasional di SC kelas prioritas BNPP dan KUP - Tersedianya perangkat radio keselamatan nasional berfrekuensi close	4 Prototipe	5 Jukdis Penelitian	4 Prototipe	4 Prototipe							
008	08	3058		<u>Dukungan dan</u> <u>dukungan teknis</u> <u>Latihan Eksp.</u> <u>Samudra Daya dan</u> <u>Responer Eku dan</u> <u>informatika</u>											491,2	
008	08	3058		Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen SOPPI											491,2	
008	08	3058		Jumlah rencana kerja dan anggaran tahunan evaluasi dan data	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok							



KODE		PROGRAM/KESEKUTAN/PRORITAS	SARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
008	00	3000		Adanya pelaksanaan rumah tangga dan pelaksanaan serta kepegawaian	33 dok	33 dok	33 dok	33 dok	33 dok							
020	00	3000		Jumlah peraturan perundang-undangan dan kerjasama	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok							
008	00	3000		Jumlah laporan pelaksanaan pelaksanaan	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok							
				Alasan: Jumlah Balas Layanan administrasi dan dukungan teknis lainnya												
008	07	PROGRAM PENYELenggara S&M POS DAN INFORMASI												18.905,7		
008	07			Perencanaan basis wilayah berdasarkan TI di daerah perbatasan dan pos												
008	07			Perencanaan Perencanaan Dasar/1 Tapsi Baskode Pos di Wilayah Perbatasan dan Dalam Wilayah	29 Tugu berkode pos	16 Tugu Berkode pos (Target 2018 dipercepat ke 2015)										
008	07			Tersedianya infrastruktur dan layanan pos yang efisien												
008	07			Jumlah NPCLPU yang beroperasi	2320	2325	2340	2345	2350							
008	07			Terwujudnya layanan terintegrasi ke Indonesia yang kuat dan mampu bersaing dengan industri digital global, efektif, efisien, peningkatan kualitas layanan, keberlanjutan target layanan kredibel, integrasi sistem dan frasi layanan terintegrasi ke publik dan terintegrasi publik dan penggunaan berbasis yang												



KODE		PROGRAM/KESEKUTUAN PRIORITAS	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET										TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI	
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
008	07			Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi	4 Dokumen Regulasi/bekas : 1. Regulasi Koneksi dan transmisi internet telekomunikasi sekal : a. Infrastruktur sharing E. Right of Way c. Infrastruktur Pasif d. Open Access e. Partnership (Kemitraan Layanan) f. Mergin Aksesibilitas g. Spin off g. Perbaikan masa masa jalinan dan jasa telekomunikasi; 2. Kebijakan regulasi lainnya												
009	07		terlaksananya pembangunan Jaringan tulang punggung serat optik nasional (trans-Asia)	Jumlah kabupaten/kota yang terhubung Jaringan tulang punggung serat optik nasional (pasca ring)	Perluasan regulasi - Dokumen tentang dan pelaksanaan Jalinan - Guna dan Insentif Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Peta RING untuk 51 Kabupaten		20% kabupaten/kota yang terhubung backbone	100% kabupaten/kota yang terhubung backbone	bertumbuh 20% dari kabupaten/kota yang terhubung backbone	bertumbuh 100% dari kabupaten/kota yang terhubung backbone							
006	07		Terlaksananya secara konsisten, terdistribusi pendapatan sektor telekomunikasi ke daerah-daerah, dan mendukung pengembangan smart cities														



KOD	PROG C	KESK K	PROGRAM KESKATAN PRIORITAS	SARAF	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
096	07				Jumlah Kabupaten yang memiliki infrastruktur pasif melalui superlat Koneksi info	Pubkota dari 6 kota-kab hasil survey pengembangan infrastruktur pasif - Detail engineering design infrastruktur pasif di 3 kota-kab yang terdapat - Circuit breaking pembangunan infrastruktur pasif di 3 kota terdapat	Pembangunan infrastruktur pasif di 2 kota terpilih	Pembangunan infrastruktur pasif di 1 kota terpilih	Pembangunan infrastruktur pasif di 1 kota terpilih	Pembangunan infrastruktur pasif di 1 kota terpilih							
096	07			Terjadinya infrastruktur dan akses layanan akses internet di wilayah non komersial	Penyelesaian (%) pengesahan dan registrasi 100000 USD	100% : 1. Ditentukan Permen Regulasi USO, 2. Tersampainya di sistem data broadband terpadu.	Inisiasi dan implementasi 1 Permen Regulasi USO	Inisiasi dan implementasi 1 Permen Regulasi USO	Implementasi 1 Permen Regulasi USO	Implementasi 1 Permen Regulasi USO							
096	07			Jumlah BTS yang dibangun dibantu blanket layanan telekomunikasi (voice, data, video & internet)	105 BTS	105 BTS	125 BTS	125 BTS	105 BTS	75 BTS							
096	07			Jumlah penyelesaian akses broadband internet	800 Lokasi (sesuai prioritas SD, SMP, SMA, Madrasah, rukunawa, desa nelayan, desa perikanan, desa pedesaan)	800 Lokasi (sesuai prioritas SD, SMP, SMA, Madrasah, rukunawa, desa nelayan, desa perikanan, desa pedesaan)	800 Lokasi (sesuai prioritas SD, SMP, SMA, Madrasah, rukunawa, desa nelayan, desa perikanan, desa pedesaan)	800 Lokasi (sesuai prioritas SD, SMP, SMA, Madrasah, rukunawa, desa nelayan, desa perikanan, desa pedesaan)	800 Lokasi (sesuai prioritas SD, SMP, SMA, Madrasah, rukunawa, desa nelayan, desa perikanan, desa pedesaan)	800 Lokasi (sesuai prioritas SD, SMP, SMA, Madrasah, rukunawa, desa nelayan, desa perikanan, desa pedesaan)							
096	07			Penyediaan pendukung akses internet	1. Pengembangan SDM dan Literasi Lokal 2. Inisiatif Koneksi Lokal 3. Revitalisasi NIK 4. DBS Nasional 5. Dokumentasi	1. Pengembangan SDM dan Literasi Lokal : 5 Lokasi 2. Inisiatif Koneksi Lokal : 1 Lokasi 3. Revitalisasi NIK	1. Pengembangan SDM dan Literasi Lokal : 10 Lokasi 2. Inisiatif Koneksi Lokal : 1 Lokasi	1. Pengembangan SDM dan Literasi Lokal : 15 Lokasi 2. Inisiatif Koneksi Lokal : 1 Lokasi	1. Pengembangan SDM dan Literasi Lokal : 20 Lokasi 2. Inisiatif Koneksi Lokal : 1 Lokasi 3. Revitalisasi NIK : 100% NIK	1. Pengembangan SDM dan Literasi Lokal : 25 Lokasi 2. Inisiatif Koneksi Lokal : 1 Lokasi 3. Revitalisasi NIK : 100% NIK							



KODE		PROGRAM/KESEKUTUPAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
09	01		Peningkatan Jangkauan siaran radio Digital melalui informasi dan peningkatan kualitas siaran Penyiaran Publik dengan menggunakan penyiaran analog, analog, dan digital													
09	01			Jumlah lokal pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi	24 lokal											
09	01			Jumlah lokal fasilitas (Pancarkan pemancar di LPP RRI yang direhabilitasi/dibangun perbatasan dan pulau terpencil	11 lokal (1 lokal pemancar di GDEB, 10 lokal pemancar analog)											
09	01			Persentase (%) ketersediaan siaran penyiaran publik dan analog ke digital	Perencanaan Regulasi TV Digital	menjadi 60% (skenario)	menjadi 80% (skenario)	menjadi 100% (NATK WIDE ANALOG SWITCH OFF)								
09	01		Terwujudnya rencana RUU Penyiaran yang mengatur kegiatan penyiaran yang sehat, berkualitas, keberagaman konten yang sesuai dengan karakter bangsa, kepastian dan keamanan													
09	01			Jumlah Daftar Inventaris Masalah (DIM) Revisi UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dibuat	Penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002											
09	01		Terwujudnya rencana RUU Radio dan Televisi													
09	01			Jumlah Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Radio dan Televisi RI yang dibuat	Penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU RTR											



KODE		PROGRAM/KESEKUTUAN PRIORITAS	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
006	07			Terdapat nomor panggilan tunggal darurat nasional (single public emergency number)												
006	07			Jumlah RAB/Nota yang melaksanakan nomor panggilan tunggal darurat nasional (single public emergency number)	100% (Kabupaten/Kota)	100% (Kabupaten/Kota)	100% (Kabupaten/Kota)	100% (Kabupaten/Kota)								
006	07			Terdapat regulasi di bidang penyenggaraan Pos dan Informatika												
006	07			RUU Telekomunikasi	100% 1. Penyusunan rancangan akademik RUU Konektivitas 3. Penyusunan Draft awal RUU Konektivitas	100% 1. Pembahasan Awal 2. Pembahasan 3. Pembahasan	100% 1. Pembahasan 2. Pembahasan 3. Pembahasan	100% 1. Pembahasan 2. Pembahasan 3. Pembahasan								
006	07			RUU Pos	100% 1. Penyusunan Rancangan Akademik Revisi UU Pos 2. Penyusunan Draft awal Revisi UU Pos	100% 1. Pembahasan 2. Pembahasan 3. Pembahasan	100% 1. Pembahasan 2. Pembahasan 3. Pembahasan	100% 1. Pembahasan 2. Pembahasan 3. Pembahasan								
006	07			RUU revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran	100% 1. Penyusunan Rancangan Akademik 2. Penyusunan Draft RUU (versi parasetor) dan perancangan RAB dengan DPR-RI	100% 1. Pembahasan 2. Pembahasan 3. Pembahasan	100% 1. Pembahasan 2. Pembahasan 3. Pembahasan	100% 1. Pembahasan 2. Pembahasan 3. Pembahasan								
006	07	1000	0000	Ekspansi Jaringan Internet											32,8	



KODIC	PROGRAM/KEKASATAN PRIORITY	SARAFAT	INDIKATOR	TARGET							ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
056	07	3059	Tersedianya perindukan keamanan kepada penyelenggara, serta akses dan keamanan informasi kepada pengguna layanan														12,4	
050	07	3050	Jumlah 100 insiden keamanan, detail dari pelanggaran di insiden setiap hari	30 top insiden	40 top insiden	50 top insiden	75 top insiden	100 top insiden										
058	07	3060	Jumlah hari respon waktu pengaduan insiden	max 2 hari	max 2 hari	max 2 hari	max 2 hari	1 hari										
050	07	3050	Jumlah strategi untuk strategi lainnya telah diimplementasikan dengan ketersediaan 20% dan terhubung dengan sistem keamanan	50	55	60	65	70										
050	07	3050	Pengadaan infrastruktur & layanan Telekomunikasi & Informatika														15.277,7	
059	07	3060	Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informasi dan penyiaran di wilayah son														3.482,0	
059	07	3060	Jumlah BTS yang dibangun di daerah kantong layanan telekomunikasi	Plot Proyek 50 BTS	75 BTS	100 BTS	160 BTS	200 BTS										
			Jumlah penyediaan akses broadband rumah	800 Lokasi (Desa/primier SD, SMP, SMA, Madrasah, rumah-rasa, desa nelayan, desa perikanan, desa perikanan)	800 Lokasi (Desa/primier SD, SMP, SMA, Madrasah, rumah-rasa, desa nelayan, desa perikanan, desa perikanan)	800 Lokasi (Desa/primier SD, SMP, SMA, Madrasah, rumah-rasa, desa nelayan, desa perikanan, desa perikanan)	900 Lokasi (Desa/primier SD, SMP, SMA, Madrasah, rumah-rasa, desa nelayan, desa perikanan, desa perikanan)	900 Lokasi (Desa/primier SD, SMP, SMA, Madrasah, rumah-rasa, desa nelayan, desa perikanan, desa perikanan)										



KODE		PROGRAM KESEKUTAN PRIORITAS	SARAFAT	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				KBO	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
050	07	3080		Jumlah infrastruktur sempadan di daerah perbatasan, tepan di dan pulau terluar nasional	10 Lokasi	15	20	25	30							
				Jumlah penyediaan perangkat pendukung (kawat)												
050	07	3080		tersedianya dukungan TIK untuk mempertahankan pengembangan ekonomi dan adopsi TIK di perbatasan										3.124,0		
050	07	3080		Jumlah rumah yang terakumulasi internet	10 Rumah	10 Rumah	10 Rumah	10 Rumah	10 Rumah							
050	07	3080		Jumlah lokasi desa relawan dan perantah yang banyak akses internet	20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi							
		3080		Terciptanya efisiensi infrastruktur nasional Terdapatnya pendukung aktiv telekomunikasi ke daerah-daerah dan Mendukung kemudahan												
050	07	3080		Jumlah Daring & Tower Base-sta	survei 8 kota dan pilot proyek 3 kota (- Penerapan 0 kota, kawat perantara infrastruktur pasif - Tersedianya detail engineering design infrastruktur pasif - Groundbreaking pilot proyek penyelesaian infrastruktur pasif di 3 kota)	2 kota	1 kota	1 kota	1 kota							
				Penyediaan infrastruktur MX	% Evaluasi NIK Eksisting	2 NIK	2 NIK	2 NIK	2 NIK							



KODE		PROGRAM/KEKATAN PRIORITAS	SARAF	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
008	07	3060		Peningkatan pendukung akreditasi akreditasi melalui pengembangan SDN dan Lirisasi: 5 Lokasi 2. Inubator Komen Lokal 3. Revitalisasi NIK DMN Nasional Rajarant Gateway Nasional Terperahnya Layanan administrasi dan dukungan teknis antara	1. Pengembangan SDN dan Lirisasi: 5 Lokasi 2. Inubator Komen Lokal: 1 Lokasi 3. Revitalisasi NIK	1. Pengembangan SDN dan Lirisasi: 10 Lokasi 2. Inubator Komen Lokal: 1 Lokasi	1. Pengembangan SDN dan Lirisasi: 15 Lokasi 2. Inubator Komen Lokal: 1 Lokasi	1. Pengembangan SDN dan Lirisasi: 20 Lokasi 2. Inubator Komen Lokal: 1 Lokasi 3. revitalisasi 50 % NIK	1. Pengembangan SDN dan Lirisasi: 25 Lokasi 2. Inubator Komen Lokal: 1 Lokasi 3. revitalisasi 100 % NIK yang telah dibenarkan							
009	07	3060	Terwujudnya jaringan internet akses lokal												2.380,0	
009	07	3060	Terwujudnya akses internet yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau serta optimal nasional Peningkatan akses layanan administrasi dan dukungan teknis antara	100% pelayanan internet yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau serta optimal nasional	20% akses internet yang belum terwujud 100% akses internet yang belum terwujud	30% akses internet yang belum terwujud 100% akses internet yang belum terwujud	40% akses internet yang belum terwujud 100% akses internet yang belum terwujud	50% akses internet yang belum terwujud 100% akses internet yang belum terwujud	60% akses internet yang belum terwujud 100% akses internet yang belum terwujud							
009	07	3060	Terwujudnya akses internet yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau serta optimal nasional Peningkatan akses layanan administrasi dan dukungan teknis antara												2.391,7	
009	07	3060	Terwujudnya akses internet yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau serta optimal nasional	20%	40%	60%	80%	-								
009	07	3060	Terwujudnya akses internet yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau serta optimal nasional												4.330,0	
009	07	3061	Peningkatan akses layanan administrasi dan dukungan teknis antara Peningkatan akses layanan administrasi dan dukungan teknis antara	40%			60%	80%							1.938,4	



KODE		PROGRAM/KEKAITAN PRIORITAS	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
008	07	3001	Terwujudnya kebijakan/regulasi di bidang telekomunikasi khusus												5,0	
009	07	3001	Perencanaan & layanan pelanggan tingkat tinggi/gawat darurat dan keselamatan umum (emergency call) serta keandalan infrastruktur TK antar K/L dan kawasan	Penertasan (%) penyusunan materi kebijakan/regulasi bidang telekomunikasi khusus	100% (Pemerintah melalui UBO)	100%	100%	100%	100%							
009	07	3001	Perencanaan & layanan pelanggan tingkat tinggi/gawat darurat dan keselamatan umum (emergency call) serta keandalan infrastruktur TK antar K/L dan kawasan	Perentase (%) migrasi sistem informasi pelayanan dengan standar (BSPS SIKG, PIS, Vulkanizing)	100% penyelesaian persiapan integrasi sistem informasi kekomersialan	20% (migrasi jaringan dengan SIKG)	25% (migrasi jaringan dengan SIKG)	20% (migrasi jaringan TI)	20% (migrasi jaringan Teknologi)							204,0
009	07	3001	Perencanaan & layanan pelanggan tingkat tinggi/gawat darurat dan keselamatan umum (emergency call) serta keandalan infrastruktur TK antar K/L dan kawasan	Perentase (%) penyediaan layanan panggilan tingkat tinggi/gawat darurat dan keselamatan umum (emergency call)	100% penyelesaian nomor panggilan tingkat darurat nasional kekomersialan di lebih dari 10 kabupaten/kota	4% (Pembangunan jaringan dengan Pemprow DKI)	12% (Pembangunan jaringan dengan Pemprow Jawa)	40% (Pembangunan jaringan dengan Pemprow Sumatera)	40% (Pembangunan jaringan dengan Pemprow Sulawesi)							
009	07	3001	Perencanaan & layanan pelanggan tingkat tinggi/gawat darurat dan keselamatan umum (emergency call) serta keandalan infrastruktur TK antar K/L dan kawasan	Perentase (%) penyediaan layanan Government Network (GN)	100% penyelesaian Dokumen Kajian tentang Peningkatan GN di Indonesia	100% penyelesaian regulasi dan tata cara dalam rangka meningkatkan Government dan Survey Lapangan	10% implementasi penyediaan service GN di K/L berdasarkan kebijakan/kegiatan LK/L GN	50% implementasi penyediaan service GN di Pemerintah Provinsi berdasarkan kebijakan/kegiatan atau GN	merjadi 100% implementasi penyediaan service GN di Pemerintah Provinsi berdasarkan kebijakan/kegiatan atau GN							
009	07	3001	Perencanaan & layanan pelanggan tingkat tinggi/gawat darurat dan keselamatan umum (emergency call) serta keandalan infrastruktur TK antar K/L dan kawasan	Perentase (%) penyelesaian studi "Protection and Disaster Relief" (PPDR)	100% penyelesaian Dokumen Kajian tentang Peningkatan PPDR di Indonesia	100% penyelesaian regulasi PPLN dan survey lapangan	20% pilot project PPDR di Jawa Tengah	20% pilot project PPDR di Banten	20% pilot project PPDR di Jawa Barat							



KODE		PROGRAM KESEKUTUAN PRIORITAS	SARANA	INDIKATOR	TARGET										TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
				Partisipasi (%) penyelenggaraan satelit Pamarintah	100% penyelesaian Cokorasi Koperinteng Peryediaan Detel: Pamarintah S Indonesia		100% penyelesaian regulasi satel pemerintah	100% penyelesaian persiapan satel pemerintah (JCM, balonbagan tender satel dan satel dan satel)								
056	07	3061	Peningkatan akses dan sarana melalui revitalisasi infrastruktur dan meningkatkan kualitas siaran pelayanan publik ke layanan televisi analog ke digital												1.451,7	
059	07	3061	Jumlah lokasi pemancar LPP TVRI yang dihabilitasi	24 lokasi (TTS Phase 2)	36 Lokasi (TTS Phase 2)	50 Lokasi (Rivutang)	30 Lokasi (Mankang)									
059	07	3061	Jumlah lokasi pembangunan pemancar on shelter, tower serta sarana & pasokan pendukung LPP TVRI di wilayah perbatasan sesuai dan sesuai	24 Lokasi	36 Lokasi	2 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi								
059	07	3061	Partisipasi (%) pelaksanaan migrasi siaran pemancar televisi dari analog ke digital	Sesuai dari kampanye kebijakan dan teknologi TV Digital, Regulasi TV DVD-2 ready	menjadi 90% (MALLRU -PPL/A- Bnglis Zeitong- Luvrasan)	menjadi 100% (NATON WIDE ANALOG SWITCH OFF)										
059	07	3061	Jumlah lokasi fasilitas pemancar ground, 40 (DPRD) yang dihabilitasi di wilayah perbatasan dan pulau terluar	sebelas lokasi + 1 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	5 lokasi	5 lokasi								
059	07	3061	Terwujudnya layanan siaran telekomunikasi khusus dan layanan khusus lainnya												49,1	
059	07	3061	Partisipasi (%) penyelenggaraan siaran pelayanan siaran telekomunikasi khusus dan layanan khusus lainnya	100%	100%	100%	100%	100%								



KODE		PROGRAM/KEKASIHAN PRIORITY	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	07	3802	Perencanaan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi												155,7	
059	07	3802	Terwujudnya penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.												155,7	
059	07	3802	Perentase (%) pencapaian target M30P dari Draft Telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%								
059	07	3802	Perentase (%) capaian:													
059	07	3802	a. Penyelenggara Pos	75%	75%	80%	85%	90%								
059	07	3802	b. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi	75%	75%	80%	85%	90%								
059	07	3802	c. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi	75%	75%	80%	85%	90%								
059	07	3802	d. LPS dan LPA	75%	75%	80%	85%	90%								
059	07	3802	Perentase (%) verifikasi TICH dalam penyelenggaraan telekomunikasi sesuai standar regulasi	100%	100%	100%	100%	100%								
059	07	3802	Perentase (%) capaian CUB penyelenggara seuler	75%	75%	80%	85%	90%								
059	07	3805	Harmonisasi dan Pembastaban Penyelenggaraan Pos												172,7	
059	07	3805	Terwujudnya kerja regulasi guna mendorong inovasi p2a yang berdaya saing dan ramah lingkungan												85,0	
059	07	3803	Perentase (%) revisi penyusunan materi kebijakan bidang Pos JU/No.38 tahun 2009 antara Pos	100%	100%	100%	100%	100%								
059	07	3803	Perentase (%) penyusunan materi regulasi pendukung bidang Pos	60%	70%	80%	70%	70%								



KODE		PROGRAM/KEKATAN PRIORITAS	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
099	07	3903		Terwujudnya infrastruktur dan layanan jasa yang merata dan terjangkau baik konvensional maupun online											71,7	
099	07	3903		Jumlah Tugu PMS yang dibangun di Jember, Jember Barat, Jember Timur	10	12	14	16	18							
099	07	3903		Jumlah KPCLPU yang beroperasi	2304	2358	2349	2348	2380							
099	07	3903		Jumlah lama dan baru titik Prangko	18	18	18	18	18							
099	07	3903		Persentase (%) pemenuhan dan pembinaan Pitalat di tingkat :												
099	07	3903		a. Propinsi	100%	100%	100%	100%	100%							
099	07	3903		b. Kota/Kab	100%	100%	100%	100%	100%							
099	07	3903		Persentase (%) verifikasi pemenuhan terhadap layanan jasa, pelaksanaan PSC, dan LRU dan LRU	100%	100%	100%	100%	100%							
				ringgapan pelayanan perijinan penyempurnaan jasa											29,7	
099	07	3903		Persentase (%) pemenuhan dan pembinaan layanan perijinan bidang jasa	100%	100%	100%	100%	100%							
099	07	3904		Pertumbuhan dan Pengembangan Persempurnaan Telekomunikasi											176,1	
099	07	3904		Terwujudnya aksesibilitas telekomunikasi dalam rangka pengembangan industri digital dan mewujudkan industri telekomunikasi yang berkembang											124,1	



KODE		PROGRAM KESEKUTAN PRIORITAS	SARANA	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
099	07	3004		100% (-) Tersedianya Regulasi Konsolidasi dan restrukturisasi industri telekomunikasi - Tersedianya platform akademik pengembangan industri digital - tersedianya Roadmap industri digital - Kebijakan regulasi tata cara regulasi dan alih daya serta tata naga distribusi hasil pendana pra bayar - Regulasi penataan bisnis dan aset/aktivitas		100%	100%	100%	100%							
099	07	3004	Peningkatan pelayanan perijinan penyelenggaraan telekomunikasi												56,0	
099	07	3004		Tersedianya (%) penanganan keluhan sengketa telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%							
099	07	3005	Pengembangan dan pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi												38,1	
099	07	3005	Meningkatnya jangkauan siaran LPT jasa pelayanan Telekomunikasi, Pos, Jasa Penyiaran, Radio dan Televisi												21,0	
099	07	3005		Tersedianya (%) sambungan jalur yang usaha sengketa LPT dan LPS untuk melakukan operasi jaringan standar untuk menutup sengketa sengketa	100%	100%	100%	100%	100%							
099	07	3005	Meningkatnya pelayanan pelanggan penyelenggaraan pelayanan												107,2	
099	07	3005		Tersedianya (%) penanganan permohonan perizinan permohonan radio dan televisi	Radio: 60% Televisi: 50%	Radio: 60% Televisi: 50%	Radio: 70% Televisi: 70%	Radio: 75% Televisi: 75%	Radio: 80% Televisi: 80%							
099	07	3005	Meningkatnya indikator pelayanan yang tersedia yang dan mutu												18,8	



K/L	KODE		PROGRAM/KEKASATAN PRIORITAS	SARANA	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI				
	PRO	KEC				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
059	07	3005	Utuh, Berkesinambungan dan Oportunitas, Taktis, dan Jujur. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi	Layanan Administrasi dan Pelayanan Taktis	Persentase (%) penyusunan materi regulasi dan kebijakan di bidang Pelayanan	50% (terdiri dari: Kebijakan dan Regulasi Percepatan (1) gini baik-kawil Transkriptasi online (2) P. Trakulasi dan kelas	60%	75%	90%	100%											
059	07	3005																		331,4	
059	07	3005																			331,4
059	07	3006						Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran laporan evaluasi dan data	8 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen								
059	07	3005						Jumlah dokumen acuan pelaksanaan anggaran	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan								
059	07	3005						Persentase (%) penyelesaian permasalahan	100%	100%	100%	100%	100%								
059	07	3005						Jumlah laporan pelaksanaan regulasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								
059	07	3005						Jumlah anggaran peraturan perundang-undangan dan revisi serta bantuan hukum	100% 1. Tersusunnya dokumen peraturan perundang-undangan 2. Tersusunnya dokumen rencana kerja 3. Advokasi dan pemangangan masalah hukum di lingkungan Dijen PPH	100% 1. Tersusunnya dokumen peraturan perundang-undangan 2. Tersusunnya dokumen rencana kerja 3. Advokasi dan pemangangan masalah hukum di lingkungan Dijen PPH	100% 1. Tersusunnya dokumen peraturan perundang-undangan 2. Tersusunnya dokumen rencana kerja 3. Advokasi dan pemangangan masalah hukum di lingkungan Dijen PPH	100% 1. Tersusunnya dokumen peraturan perundang-undangan 2. Tersusunnya dokumen rencana kerja 3. Advokasi dan pemangangan masalah hukum di lingkungan Dijen PPH	100% 1. Tersusunnya dokumen peraturan perundang-undangan 2. Tersusunnya dokumen rencana kerja 3. Advokasi dan pemangangan masalah hukum di lingkungan Dijen PPH								
059	07	3005						Dukung layanan berdasarkan	100%	100%	100%	100%	100%								



KODE		PROGRAM KESEKUTUPAN PRIORITAS	SARAFAT	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				KBO	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
000	07	3000		Jumlah Laporan pelaksanaan surat angka dan retensi sesuai with kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%							
008	08	PROGRAM PENGENDAHAN & APLIKASI INFORMASI TIKA												861,6		
008	08		Wawasanlayanan eGovernment terintegrasi untuk 10% kabupaten dan kota													
008	08		Persentase (%) penyelesaian dokumen menggunakan e-Sistem/online	100%												
008	08		Nilai Index e-Government untuk 10% kabupaten dan kota	2,8	2,9	3	3,2	3,4								
008	08		Jumlah Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan Nasional Chief Information Officer (CISO)	1PM												
008	08		tersebabnya pelayanan publik yang aman, handal, terpercaya dan bertanggung jawab serta transparan dan akuntabel													
008	08		Persentase (%) penggabungan pengguna domain informasi dan telekomunikasi (ICT) nasional	10%	90%	10%	10%	90%								
008	08		tersebabnya penyelenggaraan layanan informasi yang mengintegrasikan data dan informasi	4 Penyelenggara	semua Penyelenggara	semua Penyelenggara	semua Penyelenggara	semua Penyelenggara								
008	08		tersebabnya pengamanan sistem informasi untuk layanan e-GAM													



KODE		PROGRAM KESEKUTUAN PRIORITAS	SARAFAT	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
008	08			Jumlah Peraturan Menteri terkait keamanan informasi (dalam rangka penyelenggaraan informasi dan administrasi perijinan dan perizinan)												
				Jumlah Insan Penyenggara Sistem Elektronik Layanan Publik yang mengikuti Peningkatan Indeks Keamanan	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	
008	08		Terlengkapinya ekosistem e-commerce													
008	08			Jumlah laporan profesional e-Commerce nasional yang diserahkan Menteri	1 Laporan											
008	08			penyusunan sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi	200											
008	08			Minimalkannya digital ekonomi nasional untuk menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah												
008	08			Akselerasi industri yang digital yang komersial												
008	08		Terlengkapinya platform perdagangan B2B dan B2C													
008	08			Persentase (%) penyusunan dan pembahasan Rancangan UU tentang perubahan UU ITE	100%											
008	08		Terlengkapinya pusat industri berbasis TIK di Jawa-Bali, Sumatra, Sulawesi													
008	08			Jumlah Pusat Industri Berbasis TIK di Jawa-Bali, Sumatra, Sulawesi												
				Dokumen Kriteria Penilaian 5 Pusat Industri Berbasis TIK												



KODE		PROGRAM/KEKASIHAN PRIORITAS	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
058	05		Terdapat arsitektur E-Gov nasional	Proses dan penyelesaian masalah regulasi, blueprint, dan arsitektur e-government												
058	05				100% (RFP)	100% (Arsitektur)	100% (Blueprint)	50% (standar)	100% (standar)							
059	05		Terintegrasinya Sistem Elektronik secara nasional dan bertanggung jawab	Jumlah Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PSE) yang beroperasi	2	2	2	2	2							
059	05		Mencetak agen perubahan dalam pemanfaatan TI sebagai internet untuk, kreatif, dan produktif (IRGAKAP) untuk kegiatan hankam dan industri kreatif	Jumlah agen perubahan internet Cerdas RANGKAP Produktif	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000							
059	05		Misi protokol benua dalam rangka meningkatkan skala & sumber nasional dalam era Cyber	Jumlah regulasi Cyber Security												
			Rampunan penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Industri Nasional (Root CA)													
			Kegiatan penyelenggaraan penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Industri Nasional (Root CA)													
			Pengaduan Sistem Sertifikasi Elektronik Industri Nasional (Root CA)													



KODE		PROGRAM/KEKASATAN PRIORITAS	SARAFAT	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
				di mana sistem Sertifikasi Elektronik Induk Nasional (e-IDN)												
008	08	3020	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	30,0	
				Terselenggaranya pelayanan publik yang aman, adil, transparan dan bertanggung jawab serta konvergensi dan akuntabel											27,0	
008	08	3020			Jumlah produk peraturan perundang-undangan di bidang e-Digitalisasi	2	2	2	2	2						
009	08	3020			Persentase (%) pemelitan untuk daftar penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara layanan elektronik, penyelenggara sertifikasi keabsahan, dan penyelenggara agen elektronik, termasuk pendaftaran yang masuk	90%	90%	90%	90%	90%						
009	08	3020			Persentase (%) ketersediaan situs internet yang dapat diakses melalui perangkat mobile	70%	70%	80%	80%	80%						
009	08	3020			Persentase (%) pengalihan nama domain Indonesia dari bentuk sebelumnya (1-1)	20%	20%	20%	20%	20%						
009	08	3020			Merupakan digital ekonomi nasional untuk menciptakan lapangan kerja dan daya saing bangsa dan mendorong inovasi melalui e-GOV (eN)										30,0	



KODE		PROGRAM KEKATAN PRIORITAS	SARAFAT	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				KBO	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
008	08	3020		Persentase (%) keterlaksanaan dari profilisasi dan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia setiap tahun.	100% (Data Profile)	100%	100%	100%	100%							
008	08	3020		Jumlah rekomendasi di bidang e-dasi dan e-lisensi digital (memping digital)	3 (Roadmap e-commerce nasional untuk jangka waktu 5-10 Tahun)	3	3	3	3							
008	08	3020		Jumlah lembaga UKM yang ditransformasi menjadi e-UKM	0	0	0	0	0							
008	08	3020		Jumlah Paskom/Infocenter dan pengantar Publikasi yang ada	1 (Terlaksana untuk Lembar dan Kompetisi Start up)	1	1	1	1							
008	08	3030	Perencanaan dan Pelaksanaan e-Government												348,0	
008	08	3030	menyempatkan perancangan dan tata letak sistem dan transfer elektronik dan dokumen e-Gov												10,0	
008	08	3030	Persentase (%) dokumen Masterplan, Skema & Arsitektur e-Government Nasional	30% (RP)	50% (Arsitektur)	75% (Skema)	90% (Berdasarkan)	100% (Berdasarkan)								
008	08	3030	Jumlah produk regulasi/kabupaten bidang e-Government (Materi tagihan, SUD, Infrastruktur, Aplikasi, Fata Kabinet, Neta include NCI)	1	3	3	3	3								
008	08	3030	menyempatkan layanan e-Government yang terintegrasi untuk 10% kabupaten dan kota dengan infra e-Government nasional dan lokal												100,0	
008	08	3030	indikator PGI 34 bagi lembaga Negara/Pemerintah yang memberikan Layanan Publik dengan (dalam jangka) pada awal 2018	2,8	2,9	3,1	3,2	3,4								



KODE		PROGRAM KEKATAN PRIORITAS	SARAFAT	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
08	08	3030		Penerapan (71) tingkat layanan e-Government pada skala G2G, G2B, G2C, L1C dan E-G dan standarisasi nasional	15%	30%	50%	70%	90%							
08	08	3030		Penerapan (71) layanan yang memanfaatkan teknologi dan teknologi e-Government yang relevan, solid, terintegrasi, aman dan berkeadilan, serta capaian yang diharapkan	10%	20%	50%	70%	100%							
020	08	3031	Berkas, Integrasi dan Kerjasama Industri Informatika											188,9		
050	08	3031	tercapainya ekosistem industri TK yang berorientasi											156,0		
050	08	3031	Jumlah perjanjian kerjasama/undip dan tata kelola pembangunan industri TK			1	2	2	2							
050	08	3031	Jumlah Pusat Industri Berbasis TK di Jawa-Dat, Sumatera, Sulawesi	Dokumen Ketersediaan 5 Pusat Industri berbasis TK		1 Pusat Industri TK 1	1 Pusat Industri TK 2 & 3 dan maintenance/operasional Pusat Industri TK 1	1 Pusat Industri TK 4 dan maintenance/operasional Pusat Industri TK 1, 2, 3	1 Pusat Industri TK 5 dan maintenance/operasional Pusat Industri TK 1, 2, 3, 4							
050	08	3031	Penerapan (71) penyusunan blueprint dan peta ekosistem industri berbasis TK Indonesia	25%	50%	100%										
050	08	3031	Jumlah indikator nilai TK dan nilai digital yang menjadi prioritas kebijakan	1 indikator	1 indikator	1 indikator dan 2 startup	1 indikator dan 2 startup	1 indikator dan 2 startup	1 indikator dan 2 startup							
050	08	3031	Jumlah kegiatan pemanfaatan, inovasi dan fasilitas produk dan jasa TK	3	8	8	8	8								



KODE		PROGRAM/KESEKUTAN PRIORITY	SARAF	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
022	08	3032	Pembinaan dan Pengembangan TI/Umum, Berstandarisasi, Berkeadilan	Terdapat dukungan TI untuk penciptaan produk layanan serta dukungan TI untuk data rekaman dan rekayasa											33,0	
009	08	3032													24,0	
009	08	3032		Jumlah prototipe aplikasi untuk pengembangan layanan	1	1	1	1	1							
009	08	3032		Jumlah pengembangan aplikasi dukungan pelayanan publik melalui sistem dan pengembangan sistem aplikasi	5	10	10	10	10							
009	08	3032		Jumlah prototipe anggaran dasar masyarakat yang menyediakan Data Informasi Desa atau Sistem Informasi Kelurahan	5	10	10	10	10							
009	08	3032		Jumlah desa yang mendemonstrasikan sistem informasi Desa yang melibatkan seluruh pemangku pelayanan desa yang berwujud One Stop Services berbasis open source	1000					12	12	12	12			
009	08	3032	Memperkuat kemampuan TK masyarakat melalui akses, kredit, dan produktif (MCAKAP) dengan dukungan rekaman TI yang memfasilitasi masyarakat berkualifikasi												80,8	
009	08	3032		Jumlah provinsi, kabupaten dan kota yang telah diberikan layanan TK	5	5	5	5	5							



KODE		PROGRAM/KESEKUTUAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
009	08	3032		Jumlah perbaikan dan pemeliharaan sarana-sarana fasilitas umum untuk internet Real CAG dan M-CAP		2	2	2	2							
009	08	3032		Jumlah agen layanan internet Desa Swasti Produktif	1.800	800	800	800	500							
009	08	3032		Jumlah konten lokal yang berbeda-beda formatnya	100	110	120	130	140							
009	08	3032		Jumlah karya anak bangsa berupa aplikasi dan konten di ajang kompetisi TK Ikhlas Nasional (IKNAT), dan	800	850	900	950	1.000							
009	08	3032		Jumlah masyarakat yang mengadopsi perangkat elektronik yang mendukung pembangunan TK, seg. responsif gender, pemuda, dan masyarakat	500	500	500	500	500							
009	08	3032		Jumlah program yang mendukung di bidang Pemberdayaan	1	1	1	1	1							
009	08	3033	Pengembangan dan Penguatan Sistem Kelembagaan Informatika												128,9	
009	08	3033	Terselenggaranya Sistem Elektronik yang aman, stabil dan bertanggung jawab												130,6	
009	08	3033		Jumlah layanan publik yang memanfaatkan end-to-end digital	0	5	5	10	10							



KODE		PROGRAM/KEKATAN/PRORITAS	SARAF	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
029	06	3030		Jumlah objek/informasi Keamanan Informasi yang diurus		3	1	5	3							
				Jumlah instansi Penyelenggara Sistem Elektronik Layanan Publik yang mengikuti Penengkuatan Indeks Keamanan Informasi	60	60	60	60	60							
059	06	3032		Jumlah PDR yang beroperasi	2	2	2	2	2							
098	06	3033		Jumlah Tim Penanganan Insiden yang terbentuk	1	1	1	1	1							
098	06	3030		Jumlah kasus yang terselesaikan	7	7	7	7	7							
059	06	3034	dukungan, pelaksanaan dan dukungan teknis, layanan dan aplikasi informasi												32,0	
059	06	3034	penyempurnaan peralatan perancangan konten online												32,0	
059	06	3034		Persentase (%) penyusunan dan pembahasan Monevangan UU tentang perubahan UU ITE	80%	70%	100%									
059	06	3034		Persentase (%) penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tata Cara monev	20%	40%	60%	80%	100%							
059	06	3034		Persentase (%) penyusunan RPPF PDR	50%	100%										
059	06	3034		Jumlah Peraturan Menteri	2	1	1									



KODE		PROGRAM/KESEKUTUAN PRIORITAS	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
009	06	3034		Jumlah terbitan rapor dan anggaran, laporan evaluasi, laporan evaluasi program kerja, serta sarana dan prasarana. Jumlah perolehan perundang-undangan yang dikemukakan, pembawaan hukum, penyelesaian sengketa, peraturan perundang-undangan, jumlah laporan tahunan keuangan yang sesuai BM monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja, jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan. 3034												
009	06	PROGRAM PENJUTAN DAN PENCERAMBAAN H HORENLIKAZI DAN INFORMATIKA												827,9		
009	04		Meningkatnya jumlah kebijakan yang diterbitkan.													
009	04		Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/atau penelitian terapan, tematik, di giatkan.	30% dari 20 penelitian/ kajian	30%	30%	30%	30%								
009	04		Jumlah laporan penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika	0	2	2	2	2								
			Jumlah buku, naskah & kearahkan referensi	0	0	0	0	0								
009	04		Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika													



KODE		PROGRAM/KEKASIHAN PRIORITAS	SARAFAT	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
009	04			Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, seminar, TOT, Pengelola TK, dan Budaya Dokumentasi bagi pejabat pemerintahan	1752	1600	1958	2050	2150							
009	04			Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, seminar, dan TOT SKKSI bagi kepala/ketua	7315	1200	1408	1400	1400							
009	04			Jumlah penerima bantuan (GRI) DOKUMENISASI dan Informatika dalam dan luar negeri	225	230	250	268	325							
009	04			Jumlah rehabilitasi SIMM	1812	1908	2118	2270	2578							
009	04			Jumlah Pemangkas Rantai (RKH) Bidang Kominfo	4	4	4	4	4							
009	04		Aktivasi peningkatan kinerja nasional													
009	04			Jumlah peserta seminar/seminar bagi kepala/wakil, asah-asah, dan fasilitator	2506	4100	5108	6100	7100							
009	04	3035	Peningkatan, Desentralisasi, Demokratisasi dan Informatika dan Pengembangan, Kemitraan, dan Inovasi												35,2	
009	04	3035	Tercapainya tujuan dan model pengembangan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan dan												35,0	
009	04	3035	Jumlah kajian/benelitian yang menjadi dasar kebijakan	4	4	4	4	4								
009	04	3035	Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika	1	2	2	2	2								
009	04	3035	Jumlah kajian opini & kebutuhan informasi masyarakat di daerah	2	2	2	2	2								



KODE		PROGRAM/KESEKUTUAN PRIORITAS	SARANA	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
050	04	3035	Peningkatan keahlian dan kompetensi SCDI bidang komunikasi	Jumlah peserta pelatihan, pelatihan, simta, TIK, ToT, Pengkaji TIK, dan Bicara Dokumentasi yang apeska nasional												25,7
050	04	3035		Jumlah peserta pelatihan, pelatihan, simta, dan ToT tingkat anggarat varje mode	250	400	500	600	700							
				Jumlah peserta pelatihan, pelatihan, simta, dan ToT tingkat anggarat varje mode	1500	0	0	0	0							
			Memplainya kualitas pelayanan ibang	Jumlah jumlah yang wahadikasi/anggarat a status akefektifnya	2	2	2	2	2							
				Jumlah peserta ibang yang wahadikasi/ anggarat a status akefektifnya	2	2	2	2	2							
050	02	3030	Perencanaan, Pengembangan, Komunikasi dan Informasi dan Dokumentasi, Sistem Cent. Monev, Komunikasi dan Informasi, dan Sistem Monev													30,1
050	04	3030	Terwujudnya tujuan dan model pembangunan sebagai motivasi bagi penyucian kebijakan dan													53,6
050	04	3030		Jumlah kajian/analisis yang menjadi dasar	12	12	12	12	12							
050	04	3030		Jumlah model pengembangan sistem komunikasi dan informasi	5	6	6	6	6							



KODE		PROGRAM/KESEKUTUAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
009	04	3030	Meningkatnya Literasi TK Nasional	Jumlah kegiatan optimis & kesadaran informasi masyarakat di daerah	4	0	0	0	0						6,5	
009	04	3030		Jumlah peserta zikirah literasi TK bagi kalangan wanita, anak-anak, dan	0	500	400	500	000							
				Meningkatnya kualitas keterampilan literasi												
				Jumlah anak yang mendapat/berpartisipasi status aksedisinya	0	0	0	0	0							
				Jumlah pramuka yang yang mendapat/berpartisipasi status aksedisinya	1	2	0	0	0							
009	04	3037		Penyelenggaraan TiU Daerah Pasuruan Tingkat distrik												191,7
009	04	3037	Terseleenggaranya pendataan Dapodik IV, Dapodik 1, dan Pendidikan Kelembagaan											191,7		
009	04	3037	Pencapaian dan Penguasaan Literasi dan Budaya Literasi	Jumlah literasi	1972	1979	2179	2379	2579							
009	04	3037		Jumlah Laporan Penelitian	10	30	40	50	70							
009	04	3037		Jumlah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	700	12	10	24	30							
009	04	3037		Jumlah laporan Pengembangan Layanan Tr. Utama	19	21	25	20	27							
				Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, zikirah, dan ToT SKM/Bag anggiater vira mude												
009	04	3036	Pencapaian dan Penguasaan Literasi dan Budaya Literasi											288,6		



KOD	KOD	PROGRAM/KEKATAN PRIORITAS	SARAF	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
000	01	3030		Tercapainya Kajian bagi formulasi kebijakan bidang literasi informasi												9,0	
000	04	3030		Jumlah kajian penelitian yang menjadi bahan	5	4	4	4	4								
000	04	3030		Peningkatan keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi												714,3	
000	04	3030		Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, seminar, TIK, TaT Pengelola TIK, dan Ruraya Dokumentasi bagi aparatur pemerintahan	1300	300	700	700	700								
000	04	3030		Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, seminar, dan TaT SKKNI (bag. anggarer) tenaga muda	3.070	300	700	700	700								
000	04	3030		Jumlah penerima asesmen R2-R3 bidang komunikasi dan informasi dalam dan luar negeri	225	200	200	200	200								
000	01	3030		Jumlah regulasi sosial budaya	4	4	4	4	4								
000	01	3030		Meningkatnya Literasi TIK												5,6	
000	01	3030		Jumlah peserta seminar, pelatihan, kalangan wanita, anak-anak dan disabilitas	600	600	600	600	600								
000	04	3030		Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi, dan Budaya Digital												20,1	
000	04	3030		Tercapainya Kajian bagi formulasi kebijakan bidang APTRIS-IP												20,1	
000	04	3030		Jumlah kajian penelitian yang menjadi bahan	5	4	4	4	4								
000	01	3030		Jumlah modal pengembangan bidang komunikasi dan informasi	0	1	1	1	1								



KODE		PROGRAM/KESEKUTAN PRIORITAS	SARAFAT	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
				Meningkatnya kualitas kelembagaan ibing												
				Jumlah jurai yang melaksanakan/pelajar a status akreditasiya	1	1	1	1	1							
022	04	3030	000	000	Jumlah prestasi ibing yang meraih prestasi/ pepsilora status	0	1	1	1	1					21,0	
022	04	3040	000	000	Tersedianya Kajian bagi formulasi kebijakan bidang										31,0	
022	04	3040	000	000	Jumlah kajian/banahan yang menjadi bahan	5	4	4	4	4						
022	04	3040	000	000	Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika	0	1	1	1	1						
				Meningkatnya kualitas kelembagaan ibing												
				Jumlah jurai yang melaksanakan/pelajar a status akreditasiya	1	1	1	1	1							
				Jumlah prestasi ibing yang meraih prestasi/ pepsilora status	0	1	1	1	1							
022	04	3041	000	000	Tersedianya Kajian bagi formulasi kebijakan bidang SUPPI										21,0	
022	04	3041	000	000	Jumlah kajian/banahan yang menjadi bahan	5	4	4	4	4						
022	04	3041	000	000	Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika	0	1	1	1	1						



KODE		PROGRAM/KEKATAN PRIORITAS	SARAF	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
				Meningkatnya kualitas kelembagaan litbang												
				Jumlah hasil yang diakreditasi/evaluasi a status akreditasinya	1	1	1	1	1							
				Jumlah prestasi litbang yang diakreditasi/unggul bere status	1	1	1	1	1							
000	04	3042		Palatihan dan Pengembangan Jabatan Fungsional dan Nonjabatan										73,2		
000	04	3043		Meningkatkan keahlian dan kompetensi SDH dalam formulasi dan inovasi										48,5		
000	04	3043		Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, simtek TIK, dan ToT BKKH (bag. angketan) setiap bulan	2300	500	700	700	700							
000	04	3043		Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, simtek TIK, ToT Pengkula TIK, dan Bimbel Dokumentasi dan prosedur pemerintahan	500	500	700	700	700							
000	06	3043		Meningkatnya Literasi TK Nasional										27,7		
000	04	3043		Jumlah peserta simtek literasi literasi dengan ventis, analitis, dan kreatifitas	2300	500	400	500	500							
000	04	3042		Dokumen, Dokumen dan Dokumen Teknik lainnya Badan Litbang SDN										37,2		
000	04	3042		Terlengkapannya dukungan mandatori dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan	12	12	12	12	12					37,2		
				Jumlah Dokumen, Pengantar, Pengantar, Pengantar, Monitoring, Evaluasi dan Kojasama	9	9	9	9	9							



KODE		PROGRAM/KESEKUTAN PRIORITAS	SARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
				Jumlah Dokumen Anggaran/Laporan Keuangan dan pertanggungjawaban	5	5	5	5	5							
				Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban, Kelembagaan, dan Pengelolaan Aset	5	5	5	5	5							
				Jumlah Dokumen Manajemen Kegiatan, Laporan/Riwayat dan Organisasi, Tata Laksana	5	5	5	5	5							
09	09	Program PENGEMBANGAN INFORMATIKA DAN												775,5		
09	09		Meningkatnya Penyediaan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan Informasi Publik													
09	09		Jumlah dokumen dasar untuk penyediaan dan pemeliharaan	5	5	5	5	5								
09	09		Jumlah Dokumen BOM yang Mewakili Konten Informasi yang Tersedia yang menyatakan ketersediaan informasi publik sesuai pedoman/pengaturan	100	200	300	400	500								
09	09		Persentase (%) tingkat pemenuhan indikator keterbukaan informasi publik	15%	30%	45%	60%	75%								
09	09		Persentase (%) tingkat pemenuhan indikator keterbukaan informasi publik	20%	35%	50%	65%	80%								
09	09		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik													
09	09		Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Massa	70%	80%	90%	95%	98%								
09	09		Persentase (%) Kualitas dan Keefektifan layanan informasi publik	40%	50%	60%	70%	80%								



KODE		PROGRAM/KESEKUTAN PRIORITAS	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
058	05		Meningkatnya partisipasi publik dan peran pemerintah	Partisipasi (%) SDM Paralel Nonas yang bersertifikasi sesuai standar	20%	30%	40%	50%	60%							
				Jumlah registrasi pusat implementasi DM	5 mgase											
				Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan KULIG online, registrasi publik terhadap kegiatan kesehatan	50%											
				Tersedianya Informasi Publik Terkait Kampanye Revolusi Mental												
				Jumlah kegiatan terkait diamanatkan Kampanye Nasional Revolusi Mental di 100 kabupaten	2 kegiatan											
				Partisipasi (%) penyempitan peran Kampanye Nasional Revolusi Mental kepada masyarakat di 100 kabupaten	90%											
				Partisipasi (%) sebagai penerima publik yang menyebarkan aset untuk lapangan Kampanye Revolusi Mental	90%											
				Jumlah Dokumen Kebijakan Kementerian	32 Dokumen											
				Jumlah konten informasi strategis berdasarkan Fokus Pembinaan Indonesia di 100 Komunitas (komunitas) penyediaan informasi kepada K.L.I.D, ormas dan media	30 Jenis											
					?											



KODE		PROGRAM/KEKATAN PRIORITAS	SARAFAT	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
				tersebutnya Straker, produksi artikel diseminasi berdasarkan Fokus penguasaan Indonesia di 1 website	Jumlah materi yang dipublikasikan	12 materi										
009	00	3044	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional	Penetapan DPR	7 KLU/Prov/Kab/Kot										32,4	
000	00	3044	tersebutnya Pengorganisasian Kegiatan Komunikasi Nasional	Jumlah kegiatan dan standarisasi di forum komunikasi dan informasi publik	7 kegiatan (7 forum komunikasi, 3 registrasi tentang DPR)										20,5	
000	00	3044	tersebutnya Pembinaan SDU untuk Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Nasional	Jumlah kegiatan dan standarisasi di forum komunikasi dan informasi publik	7 kegiatan (7 forum komunikasi, 3 registrasi tentang DPR)										25,0	
046	04	3044	Tersebutnya Pembinaan SDU untuk Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Nasional	Jumlah SDU Pemada -Jumlah yang mengantar Kompeten dan kualifikasi	300 orang	400 orang	500 orang	600 orang	700 orang							
050	00	3044	Tersebutnya Pembinaan SDU untuk Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Nasional	Jumlah SDU Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik Negara yang mengantar kemampuan Jalan 3 (planning)	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang							
009	00	3044	Tersebutnya Pembinaan SDU untuk Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Nasional	Jumlah SDU Pemada -Jumlah yang mengantar Kompeten dan kualifikasi	300 orang	400 orang	500 orang	600 orang	700 orang						36,4	
046	04	3044	Tersebutnya Pembinaan SDU untuk Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Nasional	Jumlah SDU Pemada -Jumlah yang mengantar Kompeten dan kualifikasi	300 orang	400 orang	500 orang	600 orang	700 orang							
050	00	3044	Tersebutnya Pembinaan SDU untuk Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Nasional	Jumlah SDU Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik Negara yang mengantar kemampuan Jalan 3 (planning)	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang							



KODE		PROGRAM KESEHATAN PRIORITAS	SARANA	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				KBO	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
059	05	3044		Tersedianya Keppres tentang Layanan Lembaga Penyediaan untuk menyediakan curas lansia yang meliputi mental dan nutrisi lokal											1,0	Dokter
				Keppres tentang kewajiban Lembaga Penyediaan untuk menyediakan curas lansia yang meliputi mental dan nutrisi lokal	1	-	-	-	-							
059	05	3045		Keppres tentang Kurun Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Berbasis Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka NCR											308,8	
059	05	3045		Jumlah artikel yang diterbitkan, perkembangan hasil dan keberhasilan sebagai implementasi penyusunan kebijakan	300	300	300	300	300							
059	05	3045		Jumlah publikasi kurun informasi yang siap pakai, diembalase oleh pemerintah daerah dan diberitahukan ke masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai gizi yang berkaitan dengan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, gizi, gizi seimbang dan gizi masyarakat	24	30	30	30	30							
059	05	3045		Jumlah kegiatan sosialisasi dan penyediaan informasi publik dalam rangka mendukung kurun gizi yang berbasis edukasi	2	2	2	2	2							
059	05	3045													222,8	



KODE			PROGRAM/KEKASATAN PRIORITY	SARAF	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRD C	KBO				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
050	00	3040			Tertanamnya Peringatan Peran Media Publik											954,0	
050	00	3040			Jumlah Media Publik termasuk media online yang dikelola	150	160	180	180	150							
050	00	3040			Jumlah Pembangunan dan pengisian Media Center tingkat dan serungai lokal di Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah selain Terusan/Pesisir dan Sunda	30	30	30	30	30							
050	00	3040			Jumlah Kerdasan PSM (kehoop) Informasi Komunitas (IK) sebagai penyebaran informasi di daerah terluar kerdasan, terunggul dan awca lokal	10	10	10	10	10							



KODE		PROGRAM/KESEKUTAN PRORITAS	SARAFAT	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
046	04	0404		Jumlah media publik yang diterbitkan atau didominasi melalui media cetak, elektronik, media sosial, dan lainnya dan dimiliki oleh instansi kesehatan.	18	18	18	18	18							
046	04			Terlaksananya proyek pemantauan ruang-ruang bersama melalui sarana film/video bersama melalui media elektronik atau videocone atau lain-lain senilai di 1200.											36,0	
				Strategi komunikasi kepada masyarakat untuk kampanye revolusi mental pada proyek pemantauan ruang terbuka di 1.200 kecamatan.	1 dokumen strategi komunikasi kampanye revolusi mental	1 dokumen strategi komunikasi kampanye revolusi mental	1 dokumen strategi komunikasi kampanye revolusi mental	1 dokumen strategi komunikasi kampanye revolusi mental	1 dokumen strategi komunikasi kampanye revolusi mental							
				Promosi, publikasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan suasana kondusifitas anti-korupsi dan revolusi mental pada proyek pemantauan ruang terbuka di 1.200 kecamatan.	1 laporan pelaksanaan promosi, publikasi dan edukasi kampanye revolusi mental	1 laporan pelaksanaan promosi, publikasi dan edukasi kampanye revolusi mental	1 laporan pelaksanaan promosi, publikasi dan edukasi kampanye revolusi mental	1 laporan pelaksanaan promosi, publikasi dan edukasi kampanye revolusi mental	1 laporan pelaksanaan promosi, publikasi dan edukasi kampanye revolusi mental							
046	04			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi kampanye revolusi mental	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan						10,000	
046	04	0404		Terlaksananya sosialisasi kepada jajaran instansi strategis berdasarkan Fokus Pembangunan Indonesia di 1200 Kecamatan.	Jumlah kegiatan dengan lembaga diarahkan informasi revolusi mental	35/ibu									35,0	



KODIC	PROGRAM/KESEKUTAN PRIORITY	SARAF	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
009	00	3047	Terselenggaranya Pengiraan/agen Kemisuar Lemahage Komunitas untuk penyuluhan di desa												904,3	
009	00	3047	Jumlah pelayanan informasi publik melalui kemisuar dengan SKPD/OPD	30 SKPD/OPD	36 SKPD/OPD	40 SKPD/OPD	78 SKPD/OPD	80 SKPD/OPD								
009	00	3047	Jumlah kemisuar dalam rangka penguatan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mereduksi risiko atau mengurangi peringgitan informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan serta pengawalan pelaksanaan kebijakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan								
009	00	3047	Jumlah peserta forum diskusi/ forum media untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan/kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sosial dalam rangka JURNAL Pemberdayaan Melalui Komunitas Berdama Berani Berkeadilan/berkeadilan, mandiri dan berkeadilan	1.000 peserta	1.000 peserta	1.000 peserta	1.000 peserta	1.000 peserta								
009	00	3047	Pembentukan Forum Komunitas Berdama Berani Berkeadilan/berkeadilan, mandiri dan berkeadilan sebagai pemberi informasi publik kepada masyarakat	5 provinsi	5 provinsi	5 provinsi	5 provinsi	5 provinsi								
009	00	3047	Pembentukan Forum Komunitas Berdama Berani Berkeadilan/berkeadilan, mandiri dan berkeadilan sebagai pemberi informasi publik kepada masyarakat	5 provinsi	5 provinsi	5 provinsi	5 provinsi	5 provinsi								



KODE		PROGRAM KESEKUTUPAN PRIORITAS	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	05	3047		Jumlah penyedia layanan kelompok informasi manajemen di lingkungan Daerah de/atas/bawahnya, sepanjang dan pasca	18 kab/kota	15 Kab/Kota	20 Kab/Kota	25 Kab/Kota	30 Kab/Kota							
059	05	3048		Jumlah manajemen Sertifikasi Siklus Informasi Internasional											21,6	
059	05	3049		Menyempurnakan Kemitraan dengan Lembaga dan lembaga Internasional dalam rangka pemukiman pekerja negara Indonesia di China											85,2	
059	05	3048		Jumlah masyarakat Indonesia penerima informasi di LH	800 orang	800 orang	800 orang	800 orang	800 orang							



KODE	PROGRAM/KEKASIHAN PRIORITAS	SARAF	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
059	09	3045	Jumlah kemitraan dan layanan informasi nasional dengan instansi pemerintah sipil dan lembaga internasional	2 kemitraan, 5 proyek	2 kemitraan, 5 proyek	2 kemitraan, 5 proyek	2 kemitraan, 5 proyek	2 kemitraan, 5 proyek							
059	09	3046	Jumlah kemitraan dengan media asing	10 kemitraan	10 kemitraan	10 kemitraan	10 kemitraan	10 kemitraan							
059	09	3047	Jumlah Publikasi konten di media nasional tentang rita politik Indonesia	5 judul	5 judul	5 judul	5 judul	5 judul							
059	09	3048	Terselenggara Kebijakan Layanan Informasi Internasional dalam rangka pendataan												3,4
059	09	3048	Jumlah persetujuan dan pelaksanaan kebijakan, kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan informasi	1	1	1	1	1							
059	09	3049	Delapan informasi dan Delapan Saksi-Saksi Berasah di Rikusu Per												16,2
059	09	3049	Terselenggara Pelayanan Informasi Masyarakat Melalui Mousen Para Nasional												16,2
059	09	3049	Jumlah layanan administrasi dan dukungan teknis	12	12	12	12	12							
059	09	3049	Jumlah Pangerang Mousen Para Nasional	10.000	12.000	14.000	10.300	10.000							
059	09	3049	Jumlah Even Penyelenggaraan Informasi Masyarakat Kubele Mousen Para Nasional	9	9	9	9	9							
059	09	3049	Jumlah ketertarikan an era dan presensi pertunjukan	90	90	90	90	90							
059	09	3049	Jumlah Penunjukan Program, Monitoring dan Evaluasi Laporan	0	0	0	0	0							



KODE		PROGRAM/KEKASIHAN PRIORITAS	SARAF	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
04	01	3040		Jumlah Perolehan Denda Tawar dan Terselesaikan Koleksi Monumen Persejarah	12	12	12	12	12							
04	01	3050		Pelaporan Informasi dan Pelaporan Bank, Banca Bersejarah, & Ketinggian Komunikatif dan										15,5		
04	01	3000		Terwujudnya Pelaporan Banca Riwayat Bersejarah dan Pelaporan Informasi Masyarakat Melalui Museum										10,0		
04	01	3050		Jumlah Layanan administrasi dan Jukungan teknis	12	12	12	12								
04	01	3050		Jumlah Pengunjung Museum Persejarah	10000	10000	17000	18000								
04	01	3050		Jumlah Layanan Informasi kepada Masyarakat melalui Museum Persejarah	40	40	40	40								
04	01	3050		Jumlah Koleksi Bara yang Dapat Ditampilkan	4	5	5	6								
04	01	3001		Dukung, Monev dan Dukungan teknis, Lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikatif Publik										12,5		
04	01	3001		Terwujudnya Jukungan teknis dan manajemen dalam rangka pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Informasi dan										10,0		
04	01	3001		Terwujudnya Monev dan Jukung Persejarah Data Pribadi		Perjemplokan draft RUU	Pembahasan RUU di DPR	Pembahasan RUU di DPR	Penetapan RUU	Sosialisasi						
04	01	3001		Jumlah Dokumen Perencanaan yang Jelas dan Terukur	4	4	4	4	4							
04	01	3001		Jumlah Dokumen Pembukung Penetapan Reformasi	4	4	4	4	4							



KODE		PROGRAM/KEKASABAN/PRORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PROG C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
009	00	3001		Jumlah-aktivitas Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Keputusan	3	3	3	3	3							
009	00	3001		Jumlah Dokumen Keputusan	3	3	3	3	3							
009	00	3001		Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAI dan baik dan benar yang diterbitkan	3	3	3	3	3							
014	01	3001		Jumlah Dokumen Model Program dan Kegiatan dan Laporan Kinerja	5	5	5	5	5							
009	00	3001		Jumlah lms kelola pelayanan informasi dan komunikasi publik	5	5	5	5	5							
009	00	3001		Persentase STSP Dijawab yang saat peraturan dilaksanakan	80	85	90	85	100							
009	00	3001		Jumlah ketercapaian layanan dan sarana perantara sesuai kebutuhan	12	12	12	12	12							
009	00	3001		Jumlah perangkat pengaplikasian data dan komunikasi	50	50	50	50	50							
009	00	3001		Jumlah perbaikan dan fasilitas perantara	50	50	50	50	50							
				Jumlah Pelayanan informasi tercapai 80 tahun K11 Raja Arika												
009	01	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN LAIN-LAIN TEKNIK LAINNYA												8650		
				Tinjauan Reformasi Birokrasi dan tata laksana yang baik di lingkungan Kementerian dan instansi lainnya												



KODE		PROGRAM/KESEKUTUAN PRIORITY	SARAF	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
				Skor implementasi rencana: brokural di Lingkungan Kementerian Kehutanan dan Perhutanan	75	80	85	90	95							
				Persentase (%) pencapaian target Penyalangan E-Government (Peg) Kemkominfo sesuai dengan target nasional	100%	100%	100%	100%	100%							
				Skor perolehan BAKR Kemkominfo yang sesuai dengan kriteria dan kriteria TIK Persentase (%) tercapainya Kebijakan Change Management (%) realisasi anggaran yang sesuai dengan statement plan (annual control management) (%) terdapat elemen dan mekanisme Partisipasi Publik (Planning, Design, execution, dan monitoring) -----	8											
				tercapainya perubahan peran dan peran-perubahan, pelatihan, dan evaluasi produk hukum dan badan hukum di lingkungan Kementerian	100%											
008	01	3011	Koordinasi, Perencanaan, Pengawasan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Komunikasi dan											30,0		
009	01	3011												30,0		



KODE	PROGRAM KESEHATAN PRIORITY	SARAF	INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
004	01	3011	Persentase (%) diakomodasi kegiatan dan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan lain yang diakomodasi	100%	100%	100%	100%	100%								
004	01	3011	Persentase (%) kegiatan dan kegiatan lain yang diakomodasi	100%	100%	100%	100%	100%								
004	01	3011	Persentase (%) kegiatan dan kegiatan lain yang diakomodasi	100%	100%	100%	100%	100%								
008	01	3012	Kelembagaan, Kelembagaan dan Kelembagaan, Kelembagaan dan Kelembagaan, Kelembagaan dan Kelembagaan													77,4
008	01	3012	Kelembagaan, Kelembagaan dan Kelembagaan, Kelembagaan dan Kelembagaan, Kelembagaan dan Kelembagaan													77,4
008	01	3012	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Kelembagaan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok								
008	01	3012	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Kelembagaan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok								
008	01	3012	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Kelembagaan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok								
008	01	3012	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Kelembagaan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok								
008	01	3012	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Kelembagaan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok								



KODE			PROGRAM/KEKATAN PRIORITAS	SARAF	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C	KBO				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
02	01	3013	Koordinasi dan Pengawasan Pelaksanaan DIPA/DMK/DMK Perencanaan Daerah Millik, Negara Sementara Komunikasi dan												142,7		
09	01	3013	Terlaksananya peningkatan pembinaan pengabdian kawasan dari pemerintah Daerah Millik												142,7		
09	01	3013			Jumlah Laporan Keuangan Sementara Kominfo yang berhasil dilaksanakan	8 Dok.	8 Dok.	8 Dok.	8 Dok.	8 Dok.							
09	01	3013			Realisasi Anggaran dan Monev Pengadaan Barang/Jasa yang	12 Dok.	12 Dok.	12 Dok.	12 Dok.	12 Dok.							
09	01	3013			Jumlah Laporan PUPP dan Penyelidikan Ganti Rugi Kementerian Kominfo yang berhasil	12 Dok.	12 Dok.	12 Dok.	12 Dok.	12 Dok.							



KODIC	PROGRAM KESEHATAN PRIORITY	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
098	01	3013	Koordinasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Daerah Luar Negeri dan Daerah serta Layanan Kesehatan Konsultansi dan Kerjasama dan	Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan yang tertata baik	4 Dsk	4 Dsk	4 Dsk	4 Dsk	4 Dsk							
098	01	3014	Kelembagaan Kesehatan Masyarakat di Daerah Luar Negeri dan Daerah serta Layanan Kesehatan Konsultansi dan Kerjasama dan	Kelembagaan Kesehatan Masyarakat di Daerah Luar Negeri dan Daerah serta Layanan Kesehatan Konsultansi dan Kerjasama dan												55,8
098	01	3014	Kelembagaan Kesehatan Masyarakat di Daerah Luar Negeri dan Daerah serta Layanan Kesehatan Konsultansi dan Kerjasama dan	Kelembagaan Kesehatan Masyarakat di Daerah Luar Negeri dan Daerah serta Layanan Kesehatan Konsultansi dan Kerjasama dan												55,8
098	01	3014	Kelembagaan Kesehatan Masyarakat di Daerah Luar Negeri dan Daerah serta Layanan Kesehatan Konsultansi dan Kerjasama dan	Kelembagaan Kesehatan Masyarakat di Daerah Luar Negeri dan Daerah serta Layanan Kesehatan Konsultansi dan Kerjasama dan	100%	100%	100%	100%	100%							
098	01	3015	Kelembagaan Kesehatan Masyarakat di Daerah Luar Negeri dan Daerah serta Layanan Kesehatan Konsultansi dan Kerjasama dan	Kelembagaan Kesehatan Masyarakat di Daerah Luar Negeri dan Daerah serta Layanan Kesehatan Konsultansi dan Kerjasama dan												50,0
098	01	3015	Kelembagaan Kesehatan Masyarakat di Daerah Luar Negeri dan Daerah serta Layanan Kesehatan Konsultansi dan Kerjasama dan	Kelembagaan Kesehatan Masyarakat di Daerah Luar Negeri dan Daerah serta Layanan Kesehatan Konsultansi dan Kerjasama dan												50,0



KODE		PROGRAM KESEKUTAN PRIORITAS	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				KBO	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
008	01	3015		Persentase (%) Layanan Ketatausahaan dan Kepraktisan yang dapat diakses dan Pelayanan (%) Layanan rumah yang dapat diakses Sekretariat Jenderal yang tepat waktu Jumlah pembinaan/bimbel, jembatan surut, mentoring dan workshop Jumlah laporan rencana kerja, pelaksanaan rencana kerja dan pelaporan rencana dan evaluasi pelayanan internal Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%							
008	01	3015			100%	100%	100%	100%	100%							
008	01	3015			3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali							
008	01	3015			3 Dukumen	3 Dukumen	3 Dukumen	3 Dukumen	3 Dukumen							
008	01	3016	Saluran, Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemertanian Data dan Informasi sana Secara Informasi, Kemendagri Secara Sistem dan Informasi												80,	
008	01	3016	Tertampaknya Layanan Penyediaan Data dan Informasi yang Transparan dan												82,	
008	01	3015		Persentase (%) Ketersediaan Informasi dan Layanan Kemendagri Nomor 10 yang dapat diakses oleh pengguna web masyarakat (1) 1 Dalam Informasi dan Data yang Terintegrasi di lingkungan Kemendagri Nomor 10 berbasis platform data Sudikemendagri	100%	100%	100%	100%	100%							
008	01	3016			80%	90%	100%	100%	100%							
008	01	3016		Persentase (%) Ketersediaan Akses Layanan Kemendagri	88%	98%	98%	98%	99%							



KODE		PROGRAM/KEKATAN PRIORITAS	SARAFAT	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
002	01	3017	Pelayanan Informasi, Promosi, dan Aksesibilitas Akses Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika												45,2	
004	01	3017	Pelaksanaan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika yang												45,0	
005	01	3017	Penerapan prosedur publikasi kepada publik secara langsung dan melalui Social-Media	250 kali	255 kali	313 kali	360 kali	330 kali								
006	01	3017	Pemertasaan (%) website atas permintaan informasi publik yang disampaikan kepada Pusat Pengaduan Informasi dan Dokumentasi (PDIK)	95%	96%	96%	97%	97%								
004	01	3017	Survei (Survei Publik & Analisis) dan hasil analisis ke publik yang berkaitan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika	12 kali	12 kali	24 kali	24 kali	24 kali								
008	01	3017	Jumlah hasil pelayanan dalam bentuk berita, media dan video kegiatan Kementerian yang dipublikasikan melalui Karasama	10 kali	10 kali	16 kali	20 kali	25 kali								
009	01	3018	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Masalah Data Sama Internasional, Penerbitan, Komunikasi dan Informasi												50,1	
009	01	3018	Pelaksanaan Layanan Koordinasi dan Penyusunan Masalah Karasama Nasional maupun Internasional Bidang Informasi dan Komunikasi												50,1	
009	01	3018	Pemertasaan (%) capaian penyusunan masalah dan pelaksanaan kerjasama bidang masalah yang berkaitan	100%	100%	100%	100%	100%								



KODE		PROGRAM KESEKUTAN PRIORITAS	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				KBO	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
028	01	3018		Persentase (%) capaian penyelesaian kasus dan masalah kerjasama bidang hukum yang berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%							
029	01	3018		Persentase (%) capaian penyelesaian kasus dan masalah kerjasama bidang hukum yang berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%							
034	01	3019	Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementrian dan Organisasi dan Informasi												52,0	
039	01	3018	Terwujudnya peningkatan layanan peradilan dan pelayanan												52,0	
039	01	3018	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dengan Insya Kementrian	26	30	31	33	35								
040	01	3018	Jumlah Peserta Didik Struktural, Fungsional dan Tabrik	642	696	691	719	754								
038	01	3020	Dukungan, Pelaksanaan dan Layanan Informasi Publik												30,8	
038	01	3020	Terwujudnya dukungan teknis dan manajemen dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan tugas Kementrian dan Organisasi dan Informasi Publik													
046	01	3020	Terwujudnya dukungan teknis dan manajemen dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan tugas Kementrian dan Organisasi dan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%								
046	01	3020	Terwujudnya Keterseran UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbacaan Informasi Publik													



KODE	PROGRAM/KEKATAN PRIORITAS	SARAF	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
008	01	3020	Penyediaan layanan informasi publik	55%	60%	65%	65%	65%								
008	01	3020	Penyediaan (1) portal publik yang melaksanakan ketentuan Kebijakan Informasi Publik (KIP)	60%	65%	70%	70%	80%								
			Penyediaan (%) Fasilitas pemantauan Kemitia Informasi Provinsi	80%	100%	100%	100%	100%								
008	01	3021	Dukung Monev dan Dukungan Teknis Layanan Konsultasi dan Pengabdian Masyarakat													100,7
008	01	3021	Penyediaan Dukungan Teknis dan Managemen Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi													100,7
008	01	3021	Penyediaan (%) Pengukuran masalah umum yang dilaksanakan	80%	90%	90%	90%	90%								
008	01	3021	Jumlah pemasangan layanan di area jawa tengah sebanyak yang dilaksanakan	12 TV Berjangkapan + 4 Radio	16 TV Berjangkapan + 4 TV + 20 Radio	16 TV Berjangkapan + 4 TV + 20 Radio	16 TV Berjangkapan + 4 TV + 20 Radio	16 TV Berjangkapan + 4 TV + 20 Radio								
008	01	3021	Penyediaan (%) Inovasi layanan	80%	80%	80%	80%	80%								
008	01	3021	Penyediaan Peningkatan (Ming) Pelayanan Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								
008	01	3021	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi KP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								
008	01	3020	Dukung Monev dan Dukungan Teknis Layanan Konsultasi dan Pengabdian Masyarakat													80,8



KODIC	PROGRAM/ KESKATAN PRIORITAS	SARANA	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
008	01	3022	Optimalnya Layanan Administrasi Pengaduan Masyarakat melalui Saluran Keluar Peta 3in												0,0		
008	01	3022	Optimalnya Layanan Administrasi Pengaduan Masyarakat melalui Saluran Keluar Peta 3in	Persentase kualitas pengaduan melalui peta yang terselesaikan	90%	92%	94%	96%	98%								
008	01	3022	Optimalnya Layanan Administrasi Pengaduan Masyarakat melalui Saluran Keluar Peta 3in												0,0		
008	01	3022	Optimalnya Layanan Administrasi Pengaduan Masyarakat melalui Saluran Keluar Peta 3in	Jumlah program kegiatan pengaduan perdes Derasi Pers	17 program	17 program	17 program	17 program	17 program								
008	01	3022	Optimalnya Layanan Administrasi Pengaduan Masyarakat melalui Saluran Keluar Peta 3in	Persentase Indeks Kemudahan Pers	1 Dokumen Kajian	Pelaksanaan Indeks Kemudahan Pers	Pelaksanaan Indeks Kemudahan Pers	Pelaksanaan Indeks Kemudahan Pers	Pelaksanaan Indeks Kemudahan Pers								
008	02		PROGRAM Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan dan Informasi												20,0		
008	03	3022	Optimalnya Pelaksanaan dan Rehabilitasi Gedung dan Prosesnya	Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Prosesnya											20,0		
008	01	3022	Optimalnya Pelaksanaan dan Rehabilitasi Gedung dan Prosesnya	Terwujudnya Rehabilitasi Gedung dan Prosesnya											200,0		
008	01	3022	Optimalnya Pelaksanaan dan Rehabilitasi Gedung dan Prosesnya	Jumlah rencana gedung dan rehabilitasi yang sedang dikerjakan dan diteliti	2015 m2 (luas lantai dan utilitas)	3.900 m2 (Rencana 3000)	16.000 m2	16.000 m2	20.000 m2								
008	03		PROGRAM Peningkatan dan Penguatan Akuntabilitas Aparatur Pemerintahan												35,0		



KODE		PROGRAM KESEKUTUPAN PRIORITAS	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C				KBO	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		
006	00		terwujudnya tata lola pemerintahan yang baik dan bersih.													
				keefektifan pengawasan implementasi Sistem Pengendalian Intern Badan/lembaga.	3											
008	00		terwujudnya peran aktif tenaga kerja dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah di Kantor dengan menerapkan sistem Audit Internal yang mengedepankan penggunaan yang efektif untuk mengidentifikasi potensi terjadinya praktik-praktik yang melanggar dari peraturan.													
				Dipenuhi Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
006	00			Capaian Indeks Perilaku Korupsi dari KPK					65							
006	00			Perolehan LAKIP Kemkominfo	B	B	BB	A	A							
				Berkurangnya kapabilitas kerja	3											
008	00	3024	Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas-tugas Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja dan											10,7		
008	00	3024	Capaian Indeks Perilaku Korupsi pada Ditem SCPP												2,2	
006	00	3004	Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan dalam pengendalian pelaksanaan / indeks pengawasan dan pemantauan	10%	80%	95%	95%	100%								



KODE		PROGRAM KESEKUTUAN PRIORITAS	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI	
KL	PRO C				KBO	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018			2019
004	03	3024		Belum terlajut yang menanggapi adanya aksi korupsi / indeks penerapan budaya anti korupsi yang penerapannya	80%	80%	75%	80%	100%								
004	03	3024		pengadaan proyek ekuit / indeks penerapan penerapannya	90%	90%	90%	90%	90%								
004	03	3024		Penyelenggaraan Negara yang telah menyelenggarakan LK/PH / Indeks kepastian	90%	90%	90%	90%	90%								
004	03	3024	Capaian Akuntabilitas Keuangan dan Kualitas LK pada												8,0		
004	03	3024		Prosentase jumlah aduan yang berhasil dari penyampaian usul/aduan dan aset yang material	57%	57%	71%	90%	100%								
004	03	3024	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Ditjen												0,8		
004	03	3024		Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang di tindaklanjuti	80%	90%	90%	90%	90%								
004	03	3024		Nilai Evaluasi LK/PH pada Sektor di Lingkungan Ditjen (SDPP)	B	B	B	A	A								
004	03	3025	Capaian Indeks Integritas Penyelenggaraan												8,0		
004	03	3025	Capaian Indeks Persepsi Korupsi pada Ditjen DS												0,2		
004	03	3025		Pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sistem pengendalian graft/Bakti / Indeks penanganan dan penyelesaian	90%	90%	90%	90%	100%								
004	03	3025		Belum terlajut yang menanggapi adanya aksi korupsi / indeks penerapan budaya anti korupsi	80%	80%	75%	80%	100%								



KODIC	PROGRAM/ KESKATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
009	03	3025	menyusun anggaran masyarakat / Indeks pembangunan masyarakat	90%	90%	95%	95%	95%								
009	03	3025	Masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan LK/PPH / Indeks pembangunan masyarakat	90%	90%	95%	95%	95%								
009	03	3025	Capaian Akuntabilitas Keuangan dan Kualitas LK/PPH													0,6
009	03	3025	Presensi jenis-jenis obat yang bersifat dan penyempurnaan penggunaan obat-obatan yang diindikasikan	97%	97%	100%	95%	100%								
009	03	3025	Prosesase pemeriksaan hasil pemeriksaan yang diindikasikan	90%	90%	95%	95%	95%								
009	03	3025	penyusunan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Diteman													5,4
009	03	3025	Misi evaluasi LK/PPH pada Sektoral dan indikator Diteman PPH	B	B	BB	A	A								
009	03	3025	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Tujuan di lingkungan Diteman Informasi dan Komunikasi Publik dan Diteman Akuntabilitas Informasi (KPI)													5,7
009	03	3025	Capaian Indeks Persepsi Korupsi pada Diteman PPH dan Diteman Apolis													2,2
009	03	3026	Pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa dengan jalan pengadilan / Indeks penanganan dan penyelesaian sengketa yang cepat	90%	90%	95%	95%	100%								
009	03	3026	Saluran Keluaran yang menunjukkan indeks anti korupsi / indeks penanganan sengketa anti korupsi	90%	90%	100%	95%	100%								
009	03	3025	menyusun anggaran masyarakat / Indeks pembangunan masyarakat	90%	90%	95%	95%	95%								



KODE			PROGRAM/KEKATAN PRIORITY	SARAF	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C	KBO				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
058	03	3025	Capaian Akuntabilitas Keuangan dan Kualitas LK pada Dijen RPJMD		Penyelenggaraan Negara yang telah menyampaikan LK/RPN / hasil pelaksanaan	90%	90%	90%	90%	90%							
059	03	3025															0,5
058	03	3026	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Dijen		Penerapan jumlah aset yang bersifat alat penyimpanan keuangan dan aset yang tidak ada	87%	87%	71%	90%	100%							
058	03	3026					Penerapan perencanaan hasil pemerkasaan yang di sinkronkan	90%	90%	90%	90%	90%					
059	03	3025														3,0	
058	03	3026			Nilai Entitas LAMP pada Daftar di lingkungan Dijen RPJMD dan Dijen Aprika	B	B	BB	A	A							



KODE			PROGRAM/KEKATAN PRIORITAS	SARAF	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI	
KL	PRO C	KBO				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
002	00	3027	Pencapaian Mata Pelaksanaan Tugas Layanan Sarana Jarak Jauh Layanan Solutif dan Membantu Jarak Jauh													0,5		
009	00	3027	Upaya meningkatkan Penerapan Konsep e-Governance di Bidang Solutif dan Membantu														2,2	
009	00	3027	Pelaksanaan pemerintahan dan implementasi sistem pengendalian anggaran / indeks pemerintahan dan pengendalian															
009	00	3027	Satuan Kerja/LPT yang melaksanakan tugas dan fungsi / tidak penerapan budaya anti korupsi pemerintahan															
009	00	3027	pengaturan anggaran / indeks pemerintahan															
009	00	3027	penyusunan Nagara yang telah menyempatkan ...KIPN / masa kegiatan															



KODE			PROGRAM/KEKASIHAN PRIORITY	SARAF	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C	KBO				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
008	03	3027		Capaian Akuntabilitas Keuangan dan Etika L.A. pada Sejen, Balikpapan												5,0	
008	03	3027			Proses/jumlah Advok yang berkali dan penyimpangan keuangan dan aset yang monev	87%	87%	71%	86%	100%							
008	03	3027			Proses/jumlah Akreditasi hasil pemeriksaan yang di akreditasi	80%	80%	80%	90%	90%							
008	03	3027		Peningkatan Akuntabilitas Etika di lingkungan Sejen, Balikpapan SOH, dan												1,2	
008	03	3027			Nilai Evaluasi LAKIP pada Sejen di lingkungan Sejen, Balikpapan SOH, dan Sejen	B	B	B	A	A							
008	03	3028		Dukungan, Sarana dan Dukungan, Sarana, Laju, Kapasitas, dan												30,0	
008	03	3028		manajemen layanan administrasi												30,0	
008	03	3028			Proses/jumlah pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pelaksanaan yang akan dilaksanakan	85%	85%	80%	90%	90%							
008	03	3028			Proses/jumlah laporan yang dihasilkan dan pelaksanaan kegiatan yang	85%	85%	80%	90%	90%							



KODE			PROGRAM/KESEKUTUAN PRIORITAS	SARAFAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2018 (Rp. Miliar)	LOKASI
KL	PRO C	KBO				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
008	05	3020			tersudunya aparat pemerintahan siparasi yang kredibel, profesional, dan mampu memberikan nilai tambah yang maksimal tahun											120	
008	05	3020			Penerbitan apasasi sengkaman kelas vertikal auditor	25%	35%	60%	70%	85%							
008	05	3020			Penerbitan apasasi yang menjadi a. tingkat dan dibayar, penyumbang pelaksanaan	60%	60%	70%	90%	95%							
008	05	3020			Penerbitan apasasi yang memiliki vertikal keahlian khusus di bidang	12%	12%	25%	30%	47%							

MENTERI KEMENTERIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 RIJUMANTARA